

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan menjadi kebutuhan hidup yang penting bagi kelangsungan dan kemajuan suatu negara, dimanapun tempatnya juga dengan cara apa untuk mendapatkan, karena negara membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam pembangunan (Prasetya & Pribadi, 2021). Catatan sejarah menyebut, bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kebangkitan dan kemajuan Jepang pasca Perang Dunia II, karena adanya restrukturisasi pendidikan yang fundamental, dan masyarakatnya menjalani kehidupan dengan berpegang teguh pada nilai falsafah dan budaya luhur bangsanya (Hardi et al., 2023). Hal ini semakin menyiratkan bahwa urgensi pendidikan mempengaruhi kelangsungan hidup bernegara, sehingga mendapatkan pendidikan yang bermutu merupakan hak setiap warga negara tanpa terkecuali.

Sistem pendidikan nasional sebagai fondasi penyelenggaraan pendidikan akan berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia, semakin baik kualitas pendidikan maka akan menghasilkan banyak sumber daya manusia yang berkualitas untuk membangun negara menjadi lebih maju (Mardhiyah et al., 2021). Sebagai landasan peraturan pendidikan di Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 Ayat 1 mengamanatkan bahwa “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 5 ayat 1 menegaskan “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”.

Faktanya Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, namun sumber daya manusia dan mutu pendidikannya tergolong masih rendah. Hasil penilaian kualitas hasil belajar siswa berusia 15 tahun secara global, yang meliputi kemampuan literasi, numerasi, dan sains pada *Program for International Student Assessment (PISA)* yang dirilis oleh *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)*, menunjukkan skor yang diperoleh siswa di Indonesia masih tergolong sangat rendah. Berikut ini merupakan tabel penilaian PISA untuk Indonesia pada dua dekade terakhir.

Tabel 1. 1 Skor Indonesia pada PISA 2000-2022

Tahun	Rata-Rata Skor OECD/ Skor Indonesia	Kategori/Aspek		
		Sains	Membaca/ Literasi	Matematika
2000	Rata-rata Skor OECD	500	493	500
	Skor Indonesia	393	371	367
2003	Rata-rata Skor OECD	500	494	500
	Skor Indonesia	395	382	360
2006	Rata-rata Skor OECD	498	489	494
	Skor Indonesia	393	393	391
2009	Rata-rata Skor OECD	501	493	496
	Skor Indonesia	383	402	371
2012	Rata-rata Skor OECD	501	493	496
	Skor Indonesia	383	402	371
2015	Rata-rata Skor OECD	493	493	490
	Skor Indonesia	403	397	386
2018	Rata-rata Skor OECD	489	487	489
	Skor Indonesia	396	371	379
2022	Rata-rata Skor OECD	476	476	472
	Skor Indonesia	383	359	366

Sumber : diolah peneliti, 2024

Hasil PISA pada tahun 2022 menunjukkan bahwa Indonesia memperoleh skor pada peringkat rendah dan dibawah rata-rata Skor OECD. Skor untuk sains 383, membaca 359, dan 366 untuk matematika. Dibandingkan dengan hasil penilaian tahun 2018, skor Indonesia mengalami penurunan baik dalam keterampilan sains, membaca dan matematika. Rendahnya skor tersebut, salah satunya dipengaruhi oleh sedikitnya siswa yang memiliki keterampilan membaca dengan memahami teks panjang, konsep abstrak, dan membedakan antara fakta atau opini dengan konten atau sumber informasi (Nurjaman, 2024). Hasil PISA ini merefleksikan adanya tantangan dalam sistem pendidikan di Indonesia, sehingga upaya lebih intensif diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, salah satunya dengan kebijakan kurikulum.

Kurikulum menjadi satu diantara kunci penting dalam penyelenggaraan pendidikan karena memuat rancangan pembelajaran, bahan ajar, dan acuan dalam proses pembelajaran (Ansari et al., 2022). Belajar dari pandemi Covid-19 yang terjadi sekitar tahun 2020-2022, bahwa peristiwa tersebut telah menyumbangkan perubahan dalam proses pembelajaran berbasis pemanfaatan teknologi. Sistem pembelajaran secara daring dilakukan agar kegiatan pembelajaran tetap berjalan, dengan tetap memprioritaskan perlindungan kesehatan dan keselamatan peserta didik dan pendidik (Anugrahana, 2020). Pemanfaatan perkembangan teknologi kini menjadi penting guna terwujudnya ekosistem pendidikan yang relevan dengan kemajuan zaman (Faiz & Kurniawaty, 2022).

Perkembangan zaman yang dinamis semestinya didukung oleh sistem pembelajaran berupa kurikulum yang inovatif dan sesuai kebutuhan pembelajar,

karena pendekatan pendidikan sangat dinamis, terlebih dengan adanya kemajuan teknologi (Prasetya, 2015). Penggunaan teknologi dan informasi akan menjadi bagian yang krusial dalam penerapan kurikulum saat ini, sekaligus menjawab tantangan dunia pendidikan di era revolusi industri, yang menekankan pada pemberdayaan dan pengembangan keterampilan abad ke-21, sehingga lembaga pendidikan dituntut untuk mampu mengikuti perkembangan teknologi yang kian pesat (Sinulingga et al., 2022; Tuerah & Tuerah, 2023).

Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi Republik Indonesia dibawah kepemimpinan Bapak Nadiem Anwar Makarim, pada tahun 2020 menetapkan kebijakan transformasional sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan di Indonesia dengan Gerakan Merdeka Belajar atau Kurikulum Merdeka. Sebuah konsep kurikulum pendidikan yang mendukung empat aspek prioritas, meliputi 1) komitmen pada pembelajaran dasar melalui asesmen nasional; 2) dukungan terhadap keterampilan mengajar dengan mengubah pendidikan profesi guru yang berorientasi pada teori menjadi praktik; 3) intervensi pada kebutuhan sekolah, guru, dan siswa; dan 4) pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan dan mempercepat kemajuan pembelajaran (Kemdikbud RI, 2023).

Perubahan kurikulum tersebut dilatarbelakangi oleh rendahnya kualitas pembelajaran, karena desain kurikulum yang sebelumnya disebut terlalu padat dan menuntut ketuntasan materi, sehingga sistem tersebut mengakibatkan tidak adanya fleksibilitas guru dalam membantu peserta didik untuk mencapai kompetensi minimum. Output yang diharapkan dari perubahan kurikulum ini adalah pelaksanaan kegiatan belajar mengajar memusatkan pada upaya

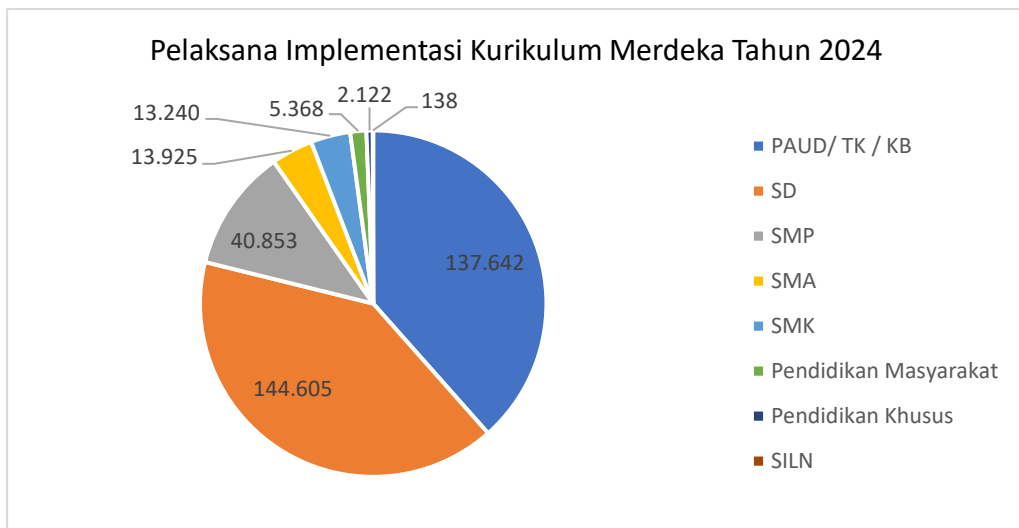
meningkatkan keterampilan bernalar kritis, memecahkan masalah, kreatif, inovatif, komunikatif, dan berkolaborasi (Ariga, 2023). Sehingga kurikulum dapat mengakomodasi kebutuhan potensi peserta didik, satuan pendidikan, dan kondisi daerah yang beragam untuk memperkecil kesenjangan pembelajaran (Wahyudin et al., 2024).

Keseriusan pemerintah dalam mengembangkan kurikulum Merdeka melahirkan sebuah kebijakan yang memberi inovasi baru dalam proses pembelajaran, berupa Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Kurikulum ini dikembangkan dengan fokus untuk memberikan keleluasaan pada pendidik dalam proses pembelajaran dan berfokus pada materi esensial untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki kompetensi akademik dan berkarakter Pancasila. Kurikulum ini bertujuan untuk mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan efektif dalam meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia serta menumbuhkembangkan cipta, rasa, dan karsa peserta didik yang berkarakter Pancasila (Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024, 2024).

Diterapkannya kebijakan kurikulum merdeka ini mendapat dukungan yang cukup baik dari pelaksana kebijakan, hal ini dapat dilihat dari jumlah satuan pendidikan yang telah menerapkan Kurikulum Merdeka dalam proses pembelajaran. Berdasarkan peta persebaran pelaksana implementasi kurikulum merdeka dalam skala nasional, sejumlah 369.875 sekolah dari berbagai jenjang, saat ini telah melaksanakan Implementasi Kurikulum Merdeka. Sedangkan

jumlah sekolah yang terdaftar pada pangkalan Data Pokok Pendidikan Kemendikbud, baik negeri maupun swasta dari berbagai jenjang berjumlah 438.934 sekolah. Hal ini berarti hampir 80% sekolah di Indonesia sudah menerapkan Kurikulum Merdeka dan menyatakan siap untuk melaksanakan perubahan.

Gambar 1. 1 Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka



Sumber : (Kemendikbudristek, 2024)

Provinsi Jawa Tengah sebagai daerah dengan jumlah sekolah terbanyak urutan ketiga di Indonesia, turut mendukung implementasi Kurikulum Merdeka. Di Provinsi Jawa Tengah terdapat 53.056 sekolah, yang terdiri dari 19.915 sekolah negeri dan 33.141 sekolah swasta dari berbagai jenjang, dengan jumlah pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka sebanyak 49.169 satuan Pendidikan. Dari pelaksana IKM dalam berbagai jenjang tersebut, pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) 99% satuan pendidikan sudah melaksanakan IKM, yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 2 SMA yang Menerapkan Kurikulum Merdeka
di Provinsi Jawa Tengah

Tahun Pelajaran	Negeri	Swasta	Belum Melaksanakan
Jumlah Sekolah	362	515	877
2021/2022	20	0	857
2022/2023	340	461	56
2023/2024	1	25	30
2024/2025	1	19	10

Sumber : (Kemendikbudristek, 2024)

Tabel di atas menunjukkan bahwa hampir semua sekolah jenjang menengah atas di Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Implementasi Kurikulum Merdeka pada tahun pelajaran 2022/2023 sampai dengan saat ini. Antusias satuan pendidikan dalam menerapkan Kurikulum Merdeka nyatanya belum berbanding lurus dengan output yang diharapkan dari penerapan Kurikulum Merdeka. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kurikulum ini masih memiliki banyak kelemahan dalam implementasinya. Sistem pendidikan dan proses pembelajaran belum terealisasi dengan baik, kurangnya keterlibatan guru dalam proses pengembangan kurikulum membuat guru menghadapi banyak tantangan dalam mengimplementasikan, dilain sisi guru selalu dituntut untuk bertindak merefleksikan kebutuhan masyarakat (Nyoman, 2022).

Nurjanah & Mustofa, (2024) dalam kajiannya menganalisis implementasi Kurikulum Merdeka pada tiga sekolah penggerak di Provinsi Jawa Tengah menemukan bahwa sedikitnya ada empat kendala yang dihadapi satuan Pendidikan dalam menerapkan Kurikulum Merdeka. *Pertama*, guru membutuhkan proses adaptasi yang cukup lama untuk menerapkan metode pembelajaran berdiferensiasi, sehingga guru masih menggunakan metode

konvensional atau ceramah dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran yang berpusat pada peserta didik belum sepenuhnya dilaksanakan; *kedua*, setiap sekolah memiliki pendekatan dan pemilihan tema yang bervariasi dalam menerapkan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan tiap sekolah; *ketiga*, guru masih mengalami kendala dan hambatan dalam optimalisasi penggunaan Platform Merdeka Mengajar (PMM), hal ini menunjukkan bahwa guru masih belum sepenuhnya memahami manfaat penggunaan PMM; *keempat*, tantangan yang paling dirasakan terkait dengan perubahan metode pembelajaran yang menitikberatkan pada interaksi aktif dan responsif antara guru dan peserta didik.

Septiani (2023) berpendapat bahwa tantangan baru dalam penerapan kurikulum ini terletak pada penyesuaian kurikulum dan perubahan budaya akademik. Pengintegrasian kompetensi umum, pilihan mata pelajaran, dan pendekatan pembelajaran yang lebih aktif dan kreatif sangat ditekankan dalam kurikulum ini. Sehingga pemahaman dan kesiapan satuan pendidikan terhadap perubahan budaya akademik menjadi krusial guna mewujudkan kualitas pembelajaran yang efektif dan bermutu. Terlebih pedoman dan standar operasional prosedur dari pemerintah sebagai pemangku kebijakan juga masih mengalami perkembangan, dan menyebabkan sistem kurikulum belum terstruktur dengan baik. Maka diperlukan suatu sistem koordinasi ditingkat satuan pendidikan untuk mengelola pelaksanaan kebijakan kurikulum merdeka.

Koordinasi antar pelaksana kebijakan sangat diperlukan untuk menciptakan keselarasan dalam proses pembelajaran. Sebagai penyelenggara pendidikan yang mengimplementasikan kurikulum merdeka sejak tahun

pelajaran 2022/2023, SMA Negeri 1 Grabag juga mengalami kendala dalam penerapannya. Berdasarkan hasil rapor pendidikan yang diperoleh selama tiga tahun pelajaran, masih menunjukkan adanya ketercapaian yang kurang dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan berbasis Kurikulum Merdeka. Rapor Pendidikan merupakan laporan hasil evaluasi satuan pendidikan berdasarkan Asesmen Nasional yang meliputi Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar dengan memotret input, proses, dan output pembelajaran di satuan pendidikan.

Hasil evaluasi pada aspek input, yang meliputi dimensi C (kompetensi dan kinerja guru dan tenaga kependidikan) dan dimensi E (pengelolaan sekolah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel) menunjukkan adanya kondisi yang tidak berbanding lurus antara keaktifan guru dalam inovasi pembelajaran dan keterlibatan warga sekolah, serta partisipasi orang tua dalam implementasi kurikulum merdeka. Pada dimensi pengelolaan sekolah yang partisipatif menunjukkan capaian restriktif, yang artinya satuan pendidikan masih terbatas dalam melibatkan orang tua dan peserta didik dalam berbagai kegiatan satuan pendidikan. Hal ini menjadi tidak sesuai dengan prinsip gotong royong dan kolaborasi yang ditetankan dalam kurikulum merdeka.

Perihal Implementasi Kurikulum Merdeka ini dianggap masih kurang optimal dalam memberikan informasi kepada masyarakat umum, karena selama ini sosialisasi yang dilakukan pemerintah dilakukan melalui bimbingan teknis (Bimtek) kepada dinas Dinas Pendidikan, Musyawarah Kinerja Kepala Sekolah (MKKS), Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS), dan mitra pembangunan. Sedangkan guru dan kepala sekolah diharuskan untuk belajar

mandiri melalui platform merdeka belajar, webinar, dan komunitas belajar. Kurang intensifnya sosialisasi berimplikasi pada ketidakpahaman guru dalam penerapan sistem pembelajaran berbasis kurikulum merdeka (Saputra et al., 2022). Idealnya orang tua peserta didik perlu mengetahui bagaimana kebijakan kurikulum merdeka, karena dalam penyusunan Kurikulum Satuan Pendidikan semestinya melibatkan komite dan masyarakat.

Selanjutnya pada aspek proses, yang meliputi dimensi D, berkaitan dengan mutu dan relevansi pembelajaran. Dalam hasil evaluasi Rapor Pendidikan menunjukkan, pengelolaan Kurikulum Sekolah memperoleh capaian disorientasi, yang berarti perencanaan dan praktik pembelajaran, serta praktik asesmen di satuan pendidikan belum berorientasi pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Begitu pula dalam Rapor Pendidikan Tahun 2023, satuan pendidikan masih perlu meningkatkan kompetensi guru dalam praktik pembelajaran interaktif, manajemen pengelolaan kelas, pengimplementasian visi misi sekolah dalam pembelajaran, serta praktik refleksi terhadap proses pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa pemangku kebijakan dalam menyusun dan menetapkan Kurikulum Satuan Pendidikan belum sepenuhnya memahami tujuan dari kurikulum merdeka.

Capaian pada aspek input dan proses tentu saja akan berpengaruh pada aspek output. Indikator pada aspek output merupakan capaian yang mengukur kemampuan literasi, numerasi, dan karakter peserta didik. Capaian pada indikator tersebut memang tergolong baik, akan tetapi pada capaian literasi pada tahun 2024, nilai yang diperoleh justru menurun. Hal ini menjadi evaluasi bagi satuan pendidikan yang sudah menerapkan program pemberdayaan dan

pengembangan minat baca peserta didik dengan kegiatan 15 menit literasi sebelum pembelajaran jam pertama.

Tantangan lain juga datang dari peserta didik, dimana banyak guru yang saat ini mengeluhkan degradasi moral peserta didik dan tidak berlakunya lagi peraturan standar minimal nilai akademik dan nilai sosial sebagai pertimbangan untuk kenaikan kelas. Hasil evaluasi guru BK dengan pemanggilan siswa dan orangtua, konsultasi dan *home visit*, siswa yang membolos tersebut beralasan bahwa peserta didik tidak hadir dan tidak melaksanakan pembelajaran tetap akan naik kelas. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi kurikulum merdeka ini ternyata menurunkan motivasi belajar peserta didik. Faiz & Kurniawaty (2022) berpendapat bahwa penurunan moral pelajar ini terjadi karena di era kemajuan teknologi saat ini masih banyak ditemui konten yang tidak mendidik yang bermunculan di media sosial. Degradasi moral ini pada akhirnya berakibat pada lemahnya karakter peserta didik.

Penerapan Kurikulum Merdeka memang menghapus sistem retensi kelas dan mengedepankan konsep pendalaman materi esensial pada tiap fase, bukan per tahun. Retensi kelas dianggap tidak meningkatkan prestasi belajar, justru memberi efek trauma psikologis dan sanksi sosial bagi peserta didik karena pandangan negatif masyarakat (Aegustinawati & Sunarya, 2023). Pencapaian pembelajaran bukan lagi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) tetapi diganti Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP). Namun justru hal tersebut menyebabkan kesulitan guru untuk mempertimbangkan penilaian peserta didik yang baik pada karakter dan keterampilan sosial, namun tidak baik dalam akademis atau sebaliknya.

Menurunnya motivasi belajar peserta didik dan hilangnya standar akademik dalam penilaian pembelajaran dikhawatirkan akan mempengaruhi kuantitas penerimaan peserta didik pada perguruan tinggi dan menurunkan minat peserta didik untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi. Sebagaimana data peserta didik yang diterima di perguruan tinggi dalam dua tahun terakhir, masih menunjukkan angka yang rendah, meskipun pada kurun waktu tersebut, kurikulum merdeka belum diterapkan.

Tabel 1. 3 Peserta Didik yang Diterima pada Perguruan Tinggi

Tahun	Jalur Masuk Perguruan Tinggi			Prosentase Peserta Didik Melanjutkan Perguruan Tinggi
	SNBP	SNBT	Mandiri, PTKIN, Swasta	
2023	9	37	56	35%
2024	14	54	38	35%

Sumber : dokumen sekolah, 2024

Rendahnya penerimaan peserta didik pada perguruan tinggi juga disebabkan karena tidak adanya keseragaman dalam pemberian nilai akademik pada setiap mata pelajaran, yang menyebabkan rendahnya peserta didik yang diterima menggunakan jalur nilai rapor. Namun pada sisi yang lain, pada tahun 2022 SMA Negeri 1 Grabag menjadi salah satu sekolah dari 10 SMA di Kabupaten Magelang yang masuk dalam top 1000 sekolah terbaik di Indonesia berdasarkan perolehan nilai UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer) yang diselenggarakan oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT). SMA Negeri 1 Grabag berada pada peringkat 911 terbaik di Indonesia (klikpendidikan.id, 2024). Hal tersebut menunjukkan bahwa satuan pendidikan ini sebenarnya memiliki potensi untuk menjadi sekolah unggul dengan

kompetensi lulusannya yang mampu bersaing untuk diterima di perguruan tinggi negeri.

Berbagai permasalahan yang terjadi di lapangan, khususnya pada SMA Negeri 1 Grabag disimpulkan bahwa dalam penerapan kurikulum merdeka, keterlibatan orangtua dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum masih rendah. Pelaksana kebijakan juga belum memahami penerapan kurikulum merdeka dalam kegiatan pembelajaran. Koordinasi sangat penting untuk dilakukan agar setiap pelaksana kebijakan benar-benar memahami tugas dan tanggung jawabnya sesuai Permendikbud Nomor 12 Tahun 2024. Sebagaimana dalam pasal 29 dijelaskan bahwa satuan pendidikan bertanggungjawab untuk menyusun dan menetapkan Kurikulum Satuan Pendidikan dengan melibatkan komite dan masyarakat. Artinya bahwa koordinasi antar pemangku kebijakan dalam evaluasi kurikulum merdeka sangat diperlukan, untuk menciptakan proses pembelajaran menjadi efektif dan sesuai kebutuhan (Kurniawan et al., 2024).

Penelitian sebelumnya juga menemukan bahwa masih terdapat kendala dalam implementasi kurikulum merdeka, yang sebagian besar dihadapi oleh guru, karena kurangnya kesiapan dan pemahaman guru tentang kurikulum merdeka itu sendiri. Menurut Riant Nugroho (2015) terdapat “lima tepat” yang harus dipenuhi untuk mencapai implementasi kebijakan yang efektif, (1) apakah kebijakan itu sendiri tepat?; (2) tepat pelaksana; (3) tepat target intervensi; (4) tepat lingkungan; (5) tepat proses. Secara umum implementasi kebijakan publik dari prosesnya terdiri dari : penerimaan kebijakan, adopsi kebijakan, dan kesiapan strategis. Berdasarkan permasalahan yang terjadi di SMA Negeri 1 Grabag, terdapat dimensi yang menurut peneliti belum memenuhi syarat “lima

tepat”, yaitu pada ketepatan proses. Dimana satuan pendidikan sebagai pelaksana kebijakan belum memahami bagaimana langkah kerja dari kebijakan ini seharusnya dilaksanakan.

Merujuk pada peraturan dan pedoman dalam penerapan kurikulum merdeka dengan berbagai dinamika permasalahan yang terjadi di lapangan, maka penelitian ini menjadi penting untuk dikaji, apakah penerapan kebijakan kurikulum merdeka ini benar-benar menjawab tantangan pendidikan di era revolusi industri saat ini, atau justru membebani peserta didik dan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana penerapan implementasi kebijakan kurikulum merdeka dan faktor-faktor pendukung serta penghambatnya ditinjau dari aspek regulasi dan teori yang mendukung implementasi kebijakan pada tingkat mikro, khususnya di SMA Negeri 1 Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang. Penelitian ini diharapkan akan mengisi ruang kajian yang belum dilakukan pada penelitian sebelumnya dan memberikan kebaruan dalam penelitian berkaitan dengan Implementasi Kurikulum Merdeka ditinjau dari pemahaman dan tanggung jawab pelaksana kebijakan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang masih dihadapi dalam menerapkan kurikulum merdeka di SMA Negeri 1 Grabag adalah sebagai berikut :

1. Disorientasi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan;
2. Kurangnya partisipasi warga sekolah dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum;

3. Hilangnya standar akademik dan menurunnya motivasi belajar peserta didik;
4. Kurangnya koordinasi antar guru dalam penetapan standar penilaian akademik.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah perihal kebijakan kurikulum merdeka, maka dalam penelitian ingin menggali dua rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan kurikulum merdeka di satuan pendidikan SMA Negeri 1 Grabag, Kabupaten Magelang?
2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam penerapan kebijakan kurikulum merdeka pada satuan pendidikan SMA Negeri 1 Grabag?

1.4 Tujuan Penelitian

Identifikasi dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas menjadi pijakan untuk selanjutnya menetapkan tujuan penelitian. Adapun penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka di SMA Negeri 1 Grabag, Kabupaten Magelang.
2. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kurikulum Merdeka di SMA Negeri 1 Grabag, Kabupaten Magelang.

1.5 Manfaat Penelitian

Berbagai kajian dan penelitian terdahulu tentunya memberikan banyak manfaat bagi penelitian selanjutnya, oleh karena itu penelitian ini diharapkan akan memberikan wawasan dan menambah keberagaman untuk penelitian selanjutnya. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengembangan khasanah keilmuan dari teori yang digunakan khususnya bidang Administrasi Publik.

Penelitian ini juga diharapkan memberi manfaat praktis dari penerapan atau pengaplikasian pengetahuan, yang diperoleh dari teori-teori yang digunakan dan penelitian-penelitian sebelumnya. Sehingga nantinya penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, stakeholder dan pemangku kebijakan terkait sebagai bentuk evaluasi dan pertimbangan rekomendasi bagi permasalahan yang terjadi, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan kurikulum tingkat sekolah menengah atas.

1.6 Tinjauan Pustaka

Tinjauan kepustakaan atau literatur berperan penting dalam suatu penelitian, sebagai acuan dalam proses penelitian. Tinjauan pustaka membantu peneliti dalam mencari acuan yang relevan, membatasi kajian penelitian, menguraikan variabel penelitian, serta menghindari replikasi penelitian. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini merujuk pada penelitian terdahulu, landasan teori, operasionalisasi konsep, yang menghasilkan kerangka berfikir penelitian.

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian, dengan menelaah kembali perbedaan maupun persamaan dengan penelitian sebelumnya. Penggunaan penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk menghindari plagiasi dan dapat menemukan kebaruan dari penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu disusun menggunakan tabel berupa peneliti, teori dan metode yang digunakan, tujuan, dan hasil penelitian. Fokus dari penggunaan penelitian terdahulu untuk mengetahui hasil penelitian berkaitan dengan implementasi kebijakan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan yang sudah dilakukan sebelumnya. Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan dalam penelitian ini.

Tabel 1. 4 Matriks Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Judul, & Sumber	Tujuan	Teori	Metode	Hasil Penelitian
1	Perdana, (2017) Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP di Kabupaten Brebes Tesis, Universitas Diponegoro	Menganalisis implementasi kebijakan program BOS pada jenjang pendidikan SMP di Kabupaten Brebes	Edwards III, bahwa implelementasi kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi, sumberdaya, disposisi, dann struktur birokrasi.	Kualitatif	Adanya standar operasional prosedur dari pemerintah pusat memudahkan Tim BOS sekolah untuk membuat laporan, beban administratif yang harus dikerjakan tidak seimbang dengan jumlah implementor, dan tim BOS Kabupaten masih kurang dalam mensosialisasikan program BOS.

2	<p>Adha et al., (2019)</p> <p>Analisis Komparasi Sistem Pendidikan di Indonesia dan Finlandia</p> <p>Tadbir : Jurnal Studi Manajemen Pendidikan, Vol.3</p>	<p>Memberikan gambaran tentang perbandingan sistem pendidikan di Finlandia dan Indonesia, dimana negara Finlandia merupakan negara dengan tingkat keberhasilan pendidikan terbaik di dunia</p>		<p>Kepustakaan, dengan mempelajari berbagai referensi untuk mendapatkan sumber pengetahuan yang relevan berkaitan dengan permasalahan</p>	<p>Beberapa perbedaan sistem pendidikan di Indonesia dan Finlandia, diantaranya (1) Indonesia lebih menekankan pada kompetisi dalam pembelajaran, sedangkan di Finlandia mengedepankan prinsip kesetaraan; (2) tidak ada sistem retensi atau tinggal kelas dan ranking nilai siswa pada sistem pendidikan di Finlandia; (3) beban belajar di Indonesia rata-rata 40 jam per minggu, sedangkan di Finlandia 30 jam per minggu; (4) pembelajaran di Indonesia banyak di ruang kelas dan tugas tatap muka, sedangkan di Finlandia banyak menggunakan metode kolaborasi dan <i>problem solving</i>; (5) perbedaan kualifikasi pendidikan pengajar, di Indonesia minimal S-1/D-4 (Sarjana) sedangkan di Finlandia S2 (Master); (6) kualifikasi peserta didik untuk memasuki pendidikan dasar di Finlandia 7 tahun, sedangkan di Indonesia 6 tahun. Kajian ini menyimpulkan bahwa nilai-nilai kesetaraan dan keadilan, kepercayaan dan tanggungjawab, kerjasama dan kolaborasi dikembangkan dalam sistem pendidikan di Finlandia, sehingga dapat meraih sistem pendidikan terbaik di dunia.</p>
3	<p>Wahyudi & Lutfi, (2019)</p>	<p>mengetahui implementasi</p>	<p>kualitatif melalui literatur review</p>	<p>Viennet dan Pont (2017),</p>	<p>Permasalahan sistem pendidikan di Indonesia meliputi ketidakseimbangan</p>

	<p>Analisis Reformasi Pendidikan dalam Mewujudkan Pemerataan Kualitas Pendidikan di Indonesia</p> <p>Jurnal Administrasi Publik, Vol. 2</p>	<p>kebijakan sistem zonasi dan perbandingannya dengan negara lain</p>		<p>yang menjelaskan keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor; <i>smart policy design, inclusive stakeholder engagement, conductive institutional and societal context, dan coherent implementation strategy.</i></p>	<p>daya tampung, pemerataan Pendidikan, mutu Pendidikan, dan relevansi Pendidikan. Reformasi Pendidikan di Amerika Serikat dilakukan melalui <i>No Child Left Behind (NCLB)</i>, dengan meningkatkan Pendidikan anak usia dini, keterlibatan orang tua, standar akademik dan keterampilan dengan fokus pada keluarga kurang beruntung untuk belajar melalui penilaian sumatif dan formatif, pengembangan profesional guru dan administrator, program transisi dunia kerja dan penelitian Pendidikan. Di Singapura perubahan besar dilakukan melalui <i>“Thinking School, Learning, Nation”</i> yang berfokus pada keterampilan kreatif, hasrat belajar seumur hidup, komitmen nasionalis, Pendidikan holistic, serta peran guru yang memberikan banyak ruang interaksi untuk siswanya.</p>
4	<p>Puspitasari & Nugroho (2021)</p> <p>Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka FISIP UPN Veteran Jawa Timur</p>	<p>Mengetahui implementasi kebijakan Merdeka Belajar dan kendala-kendala yang dihadapi, dengan menganalisis menggunakan</p>	<p>Riant Nugroho (2014) tentang Ketepatan Implementasi Kebijakan, meliputi : 1)ketepatan kebijakan; 2) ketepatan pelaksanaan; 3) ketepatan target; 4) ketepatan lingkungan; 5) ketepatan proses yang terdiri dari penerimaan</p>	<p>Kualitatif Deskriptif</p>	<p>Berdasarkan 5 tepat, kebijakan MBKM 1) kurang tepat, karena terkesan tergesa-gesa diterapkan dan tidak ada program prioritas; 2) pelaksanaan MBKM masih menemui banyak kendala karena banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan kegiatan; 3) target kurang tepat, dimana target MBKM adalah seluruh mahasiswa Indonesia yang memiliki kesempatan untuk mengembangkan</p>

	Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol.11	teori ketepatan kebijakan	kebijakan, adopsi kebijakan, dan kesiapan strategis		kompetensinya, namun dalam praktiknya terdapat kuota dan seleksi; 4) Ketepatan lingkungan kurang; tidak semua perguruan tinggi didukung oleh lingkungan kebijakan MBKM; 5) pada penerimaan proses, dari penerimaan kebijakan dimaknai berbeda-beda oleh setiap perguruan tinggi, sehingga menghambat kerjasama antar perguruan tinggi. Hal ini menyebabkan adaptasi kebijakan masih belum dilaksanakan secara maksimal. Pada kesiapan strategis, belum ada sistem yang menunjang program kegiatan dan sulitnya membuat kesepakatan antara perguruan tinggi dengan mitra membuat kebijakan ini sulit diimplementasikan.
5	Nurjanah & Mustofa (2024) Transformasi Pendidikan : Menganalisis Pelaksanaan Implementasi Kurikulum Merdeka pada 3 SMA Penggerak di Jawa Tengah	Mendalami pemahaman tentang implementasi kurikulum merdeka beserta tantangannya pada sekolah penggerak	Grounded Theory dalam pendekatan penelitian kualitatif	Kualitatif, studi kasus di SMA PGRI Wirosari Kab. Grobogan, SMAN 1 Gondang Kab.Sragen, dan SMAN 1 Sambungmacan Kab. Sragen.	Kesiapan implementasi kurikulum merdeka belum sepenuhnya memadahi untuk pembelajaran berdifensiasi atau berpusat pada peserta didik, sehingga guru masih menggunakan metode lama. Penerapan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dipilih sesuai tema dan kebutuhan sekolah masing-masing, sehingga menjadi sumber inspirasi antar lembaga pendidikan. Beberapa guru belum aktif pada pengoptimalan PMM karena faktor usia. Transisi metode pembelajaran dari konvensional ke metode inovatif

	Didaktika : Jurnal Kependidikan Vol.13				membutuhkan waktu dan kesiapan yang matang, karena tantangannya terletak pada mengubah pola pikir guru agar sejalan dengan tujuan.
6	Aegustinawati & Sunarya, (2023) Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Mengatasi Retensi Kelas di Sekolah Menengah Atas Jurnal Pedagogy, Vol.10	Mengetahui penerapan Kurikulum Merdeka untuk mengatasi retensi kelas, dilatarbelakangi masih tingginya presentase siswa yang harus mengulang kelas pada tahun pelajaran berikutnya.		Kualitatif, studi kasus di SMA Negeri 1 Tempilang	Kurikulum merdeka yang diterapkan dapat mengatasi permasalahan retensi kelas, karena ketidaktercapaian siswa dalam satu tujuan pembelajaran harus sesegera mungkin mendapat perbaikan dan penyelesaian selama proses pembelajaran. Perbaikan tidak harus menunggu akumulasi ketidaktercapaian siswa dalam jangka waktu tertentu. Dibutuhkan peran aktif seluruh komponen pendidikan, Kepala Sekolah menyusun kebijakan strategis untuk memastikan guru benar-benar memahami kurikulum merdeka, lembaga kependidikan seperti BPMP dan BGP untuk mendampingi kepala sekolah dan guru, serta orangtua yang harus dilibatkan dalam proses perkembangan akademik peserta didik.
7	Syafrizal, (2023) Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Perspektif Teori	Menganalisis kebijakan kurikulum merdeka menggunakan teori humanistik	Teori Belajar menurut Arthur W.Combs (1912) yang menyatakan bahwa suatu hal yang sangat penting bagi seorang guru adalah bagaimana caranya siswa bisa	Kualitatif, studi kasus	Terdapat kesesuaian antara implementasi kurikulum merdeka dengan teori belajar humanistik, bahwa : 1) Kemerdekaan proses belajar dengan memperhatikan keberagaman peserta didik, alokasi waktu, pengembangan minat bakat, dan perangkat ajar;

	Belajar Humanistik di MTSN 3 dan MTSN 19 Jakarta Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta		memperoleh arti bagi pribadinya, dari bahan pelajarannya, serta bagaimana siswa dapat menghubungkan bahan pelajaran dengan kehidupannya.		2) Kebermaknaan pembelajaran dengan mengimplementasikan P5, dimana pembelajaran berpusat pada murid, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator; 3) Penilaian proporsional, dengan berbagai teknik penilaian berdiferensiasi yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
8	Umam, (2023) Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar Tesis, UIN Maulana Malik Ibrhim Malang	Menganalisis perencanaan, implementasi dan evaluasi Kurikulum Merdeka yang diterapkan di SD Plus Rahmat dan SDN Banjaran 3 Kota Kediri.	Konsep Kurikulum dan Implementasi Kurikulum Merdeka	Kualitatif, studi kasus di dua sekolah dasar.	Dengan perencanaan, penerapan, dan evaluasi yang jelas dan terukur dari kedua sekolah, dapat meningkatkan kualitas mutu pembelajaran dan pengalaman peserta didik. Perencanaan dituangkan dalam Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) dengan penyusunan modul untuk pengembangan konteks lokal. Implementasi Kurikulum Merdeka dilakukan dengan pembelajaran intrakurikuler dan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. dan evaluasi terdiri dari assesmen formatif dan sumatif untuk menggambarkan pencapaian siswa.
9	Septiani, (2023) Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar	Menganalisis implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar dan mengukur	Teori self-directed learning di kampus Merdeka	Kualitatif dengan kepustakaan	Implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar berdampak positif terhadap peningkatan partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. Siswa memiliki kebebasan untuk memilih model pembelajaran sesuai dengan minat, bakat,

	dan Efektivitas Peran Guru Conference of Elementary Studies	efektivitas peran guru dalam konteks kurikulum merdeka.			dan kebutuhan pribadi mereka. Kurikulum ini juga mendorong penggunaan teknologi dalam pembelajaran, sehingga siswa dapat mengakses sumber daya pembelajaran yang lebih luas dan beragam.
10	Ria Sitorus et al., (2023) Analisis Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar pada Tingkat SMA Jurnal Pendidikan West Science, Vol.1	Menganalisis penerapan kurikulum merdeka di beberapa sekolah tingkat menengah atas di Indonesia.	Konsep Kurikulum Merdeka Belajar	Deskriptif kualitatif kepustakaan	Pandangan positif dari penerapan kurikulum merdeka, dimana beberapa program diubah dan disederhakan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih efisien dan sesuai perkembangan zaman. Beberapa perubahan program tersebut diantara; 1) penilaian asesmen yang didasarkan pada karakter siswa; 2) penyusunan RPP yang berorientasi pembelajaran siswa; 3) penerapan jalur zonasi untuk mengurangi kesenjangan kualitas antar sekolah; dan 4) fleksibilitas penggunaan dana operasional untuk keperluan sekolah dan kesejahteraan guru honorer.

Sumber : diolah peneliti, 2024

Berbagai kajian berkaitan dengan implementasi kebijakan dan penerapan Kurikulum Merdeka pada uraian di atas menunjukkan bahwa penelitian pernah dilakukan sebelumnya. Setiap peneliti memiliki karakteristik dan fokus tersendiri dalam kajiannya, selanjutnya diambil kesimpulan dari penelitian sebelumnya. *Pertama*, beberapa penelitian tersebut umumnya membahas tentang implementasi kebijakan sistem pendidikan yang secara umum, menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan atau literatur review. *Kedua*, kajian tentang implementasi kurikulum merdeka pada penelitian sebelumnya membahas tentang penerapan kurikulum secara praktis di lapangan dengan menguji implementasi, efektivitas, dan dampak dari penerapan kurikulum merdeka. *Ketiga*, penerapan kurikulum merdeka memberikan dampak positif bagi penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia apabila dilaksanakan dengan metode pembelajaran yang tepat.

Adapun perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus yang akan digunakan. Penelitian ini berfokus untuk mengkaji implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka beserta faktor pendukung dan penghambat kebijakan, sesuai Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024, khususnya pada BAB III Implementasi Kurikulum Merdeka yang pada bagian kesatu memuat peraturan terkait tanggung jawab setiap tingkatan organisasi, mulai dari pimpinan tinggi madya, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan, serta bagian kedua mengatur tentang Kurikulum Satuan Pendidikan. Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 1 Grabag, Kabupaten Magelang sebagai satuan pendidikan dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, hal untuk

memberikan batasan dalam penelitian ini, bahwa penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan kurikulum merdeka pada tingkat daerah.

1.6.2 Kajian Teori Administrasi Publik

Administrasi menurut Ordway Tead (1951) menekankan administrasi pada tiga komponen, yaitu tujuan (*certain defined purpose*), usaha bersama kelompok yang bertugas untuk mencapai tujuan (*associated efforts of group of individuals to realize*), dan kegiatan yang mereka lakukan (*the necessary activities and facilitating*) (Anggara, 2012). Administrasi publik menurut Chandler dan (Plano, 1988 dalam Keban, 2019) adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

Adimistrasi publik mengalami evolusi atau perkembangan paradigma secara bertahap dari perspektif klasik sampai kontemporer. Sejak kemunculannya, administrasi negara atau administrasi publik memiliki empat orientasi yang berbeda, yang masing-masing disebut dengan administrasi public lama (*Old Public Admnistration*), administrasi public baru (*New Public Administration*), manajemen public baru (*New Public Management*), dan pelayanan public baru (*New Public Service*).

Dalam *Old Public Administration*, Wilson menekankan perlunya dikotomi antara politik dan administrasi. Risiko dan konsepsi ini adalah bahwa administrator publik rentan untuk mendapatkan gangguan dari ranah politik, mislanya melalui penunggang atau mobilisasi birokrasi untuk kepentingan politik. Hal ini mendatangkan berbagai kritik, hingga memunculkan paradigma *New Public Administration* (NPA). *Pertama*, dikotomi politik dan administrasi

tidak bisa dipertahankan. Adiministrator seharusnya turut terlibat dalam pembuatan kebijakan, karena menyerahkan pembuatan kebijakan semata kepada agen-agen politik di lembaga legislatif dan eksekutif terbukti tidak mampu menyelesaikan masalah publik (kemiskinan, pengangguran, diskriminasi, dll) secara memuaskan. *Kedua*, ilmuwan NPA berpendapat bahwa ilmuwan generasi lama yang mewakili OPA terlalu berkuat pada positivisme sehingga mereka hanya berfokus pada koleksi data empiris dan manipulasi statistik. Akibatnya berbagai pertimbangan nilai dan normatif yang terlibat dalam penelitian pun dikesampingkan. *Ketiga*, nilai-nilai dominan dalam OPA yang kurang kondusif untuk menciptakan sistem administrasi yang berorientasi pada pencapaian kepentingan publik. Dua nilai dalam OPA yang banyak dikritik adalah efisiensi dan hierarki. Dengan obsesinya pada efisiensi maka administrasi publik akan terjebak pada personalisasi dan obyektifikasi. Seharusnya nilai keadilan (*equity*) yang harusnya lebih diutamakan.

New Public Management (NPM) lahir sebagai kritik atas paradigma administrasi publik lama. Secara teoritis, gagasan NPM didukung dengan pendekatan perspektif rasionalis (teori pilihan publik, teori agensi, teori *principal agen*) dan pendekatan manajerialisme atau neo-manajerialisme. Untuk itu, mekanisme hubungan antara administrator publik dengan yang dilayaninya dipahami sebagai hubungan yang mirip antara produsen dengan pelanggan. Manajer publik dituntut untuk memilih antara menemukan cara baru yang inovatif untuk meningkatkan hasil atau memprivatkan fungsi organisasinya dengan menyerahkan ke swasta. Peran dari pemerintah adalah untuk mengarahkan bukan mendayung (*to steer not row*). Pemerintah cukup

bertugas memonitor implementasi kebijakan atau menjadi pembeli layanan atau jasa.

Sedangkan paradigma administrasi publik yang terakhir diperkenalkan adalah *New Public Service* (NPS). NPS merupakan seperangkat gagasan mengenai peran administrasi negara dalam sistem *governance* yang menempatkan pelayanan publik, tata kelola demokratis, dan keterlibatan publik di pusatnya. Secara teoritis, NPM mendapatkan landasannya dari empat pendekatan atau teori : teori kewarganegaraan demokratis, model komunitas dan masyarakat sipil, organisasi humanis, dan administrasi publik baru, dan administrasi publik post-modern. Melalui NPS publik dipandang secara utuh dan humanis, tidak direduksi sebagai pelanggan yang berciri ekonomistis-egoistis maupun sebagai pihak luar yang menjadi sasaran mekanis birokrasi. Lebih dari itu, nilai-nilai yang menopang keadaban publik juga dijunjung tinggi dalam NPS : demokrasi, keadilan, kesejahteraan, dan akuntabilitas.

Keban (2019) menyatakan administrasi publik adalah medan dimana para aparat pemerintah atau eksekutif melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan sektor publik khususnya penyediaan pelayanan bagi kepentingan publik, maka peran administrasi publik sangat menentukan kestabilan, ketahanan, dan kesejahteraan suatu negara. Dengan demikian ketika administrasi publik mampu mengubah perilaku keberadaan dan kompetensi sumber daya yang ada maka secara makro akan menunjukkan kesejahteraan suatu negara.

1.6.3 Kebijakan Publik

Istilah kebijakan publik merupakan terjemahan istilah bahasa Inggris, yaitu *public policy*. Kata *policy* ada yang menerjemahkan menjadi “kebijakan” (Samodra Wibawa, 1994; Muhadjir Darwin, 1998) dan ada pula yang menerjemahkan menjadi kebijaksanaan (Islamy, 2001; Abdul Wahab, 1990). Meskipun belum ada kesepakatan bahwa *policy* diterjemahkan menjadi “kebijakan” atau “kebijaksanaan”, kecenderungan *policy* digunakan istilah kebijakan. Oleh karena itu *public policy* diterjemahkan menjadi kebijakan publik (Anggra, 2018).

Menurut Thomas R. Dye, 1992 (dalam Anggara, 2018), “*Public policy is whatever the government choose to do or not to do*” (kebijakan publik adalah apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Dye mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian, disinilah pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

Pada konteks yang lain, Islamy, 1997:20 (dalam Anggara, 2012:501) mengemukakan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah dengan berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Dalam pengertian ini, Islamy menjelaskan empat pengertian tentang kebijakan public, yaitu :

- 1) Kebijakan publik dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan pemerintah;
- 2) Kebijakan publik tidak cukup hanya dinyatakan, tetapi harus dilaksanakan dalam bentuk yang nyata;
- 3) Kebijakan publik baik untuk melakukan sesuatu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu;
- 4) Kebijakan publik harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Tujuan dari kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal dan sah karena kebijakan publik dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Kemudian, kebijakan publik sebagai hipotesis adalah kebijakan yang dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai sebab dan akibat. Kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi-asumsi mengenai perilaku (Anggara, 2018:36).

Kebijakan publik merupakan tempat bergantung berbagai pihak dalam menyelesaikan masalah publik secara rasional dan dapat diterima oleh berbagai kelompok kepentingan yang terlibat (Indiahono, 2009). Neo dan Chen (2007) dalam Indiahono, (2009) mengemukakan bahwa institusi yang dinamis memiliki ciri-ciri kaya akan ide baru, persepsi yang segar, *up-grading* yang berkelanjutan, beraksi cepat, dan beradaptasi dengan fleksibel, inovatif, dan kreatif. Institusi seperti ini yang disebut akan melahirkan institusi yang selalu

belajar, kebijakan cepat dan efektif, selalu melakukan perubahan yang tiada berakhir.

Normina (2017) menyatakan kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik menyatakan, pertama, kebijakan pendidikan berkaitan dengan upaya pemberdayaan peserta didik. Oleh karena pendidikan merupakan ilmu praktis maka kebijakan pendidikan merupakan proses pemanusiaan yang terjadi dalam lingkungan alam dan sosialnya sehingga kebijakan pendidikan adalah penjabaran dari visi dan misi dari pendidikan dalam masyarakat tertentu. Sedangkan validasinya terletak pada seberapa besar sumbangan kebijakan tersebut bagi proses pemerdekaan individu dan pengembangan pribadi individu yang kreatif dalam mentransformasikan masyarakat serta kebudayaannya.

Kedua, kebijakan pendidikan lahir dari ilmu praktis pendidikan sehingga kebijakan pendidikan meliputi proses analisis kebijakan, perumusan kebijakan, implementasi dan evaluasi kebijakan. Proses kebijakan tersebut dapat menggunakan model-model yang telah baku, walaupun model-model tersebut mempunyai kelemahan dan kekurangan, namun dengan kombinasi berbagai model dapat dihasilkan proses kebijakan yang layak.

Ketiga, pendidikan milik masyarakat (barang publik) maka suara masyarakat dalam berbagai tingkat perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan perlu didengar dan diakomodasi. Selain itu, pendidikan sebagai barang publik hendaknya ditangani oleh pemerintah dan upaya menyerahkan pendidikan ke pasar merupakan suatu proses komersialisasi dan hal ini akan merugikan kepentingan bangsa yang lebih luas melebihi semata-mata pertimbangan kelangkaan sumber dana.

Keempat, merujuk kepada filsafat moral maka kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik bukan kebijakan pendidikan bagian dari kebijakan publik. Selain alasan filsafat moral yang memosisikan kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik, juga didukung oleh teori kegagalan pasar dalam teori ekonomi politik.

1.6.4 Proses Kebijakan Publik

Kraft dan Furlong dalam (Nugroho, 2015) menyatakan bahwa kebijakan publik tidak dibuat dalam keadaan vakum. Kebijakan dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi, nilai politik yang berlaku dan suasana hati masyarakat pada suatu waktu, struktur pemerintahan, dan norma nasional serta norma budaya lokal, merupakan variabel yang lain. Oleh karenanya harus ada suatu konteks yang memicu munculnya kebijakan publik, konteks itulah yang dinamakan rangkaian proses kebijakan publik.

Terdapat beberapa model dalam proses kebijakan publik yang relevan dalam kehidupan saat ini. Pertama, “Model Sistem” yang dikembangkan oleh David Easton dalam sebuah tulisan *A Framework for Political Analysis* (1965), model ini menggambarkan bahwa sistem politik sebagai proses yang kompleks, melibatkan input, proses atau seluruhnya, dan output. Faktor input adalah permintaan dan dukungan dan outputnya adalah keputusan dan tindakan. Proses politik dari sistem politik ada dalam lingkungan dan seluruh konteksnya.

Kedua, Model “*Policy Process as Linear Stages* (Proses Kebijakan Sebagai Tahapan Linier)” yang dikembangkan oleh James E. Andersen, David W. Brady, dan Charles Bullock III (1978). Terdapat lima tahap proses kebijakan

dalam model itu, yaitu 1) agenda kebijakan; 2) perumusan kebijakan; 3) adopsi kebijakan; 4) implementasi politik; dan 5) evaluasi politik.

Ketiga, Thomas R.Dye (1995) mengembangkan “*Linear Model of Policy Process* (Model Linier Proses Kebijakan)” dengan enam langkah, *pertama*, mengidentifikasi masalah kebijakan, *kedua*, mengembangkan model penetapan agenda untuk perkembangan kebijakan; *ketiga*, melaksanakan proses perumusan kebijakan; *keempat*, menemukan dasar hukum bagi kebijakan dan melegitimasi kebijakan; *kelima*, implementasi kebijakan; dan *keenam*, evaluasi kebijakan pada implementasi dan kinerja kebijakan.

Dunn (1994) menjelaskan proses kebijakan publik melalui tahapan-tahapan berikut :

1. Penyusunan Agenda

Tahap penyusunan agenda kebijakan merupakan penentuan dari apa yang menjadi masalah publik yang perlu dipecahkan;

2. Formulasi Kebijakan

Pada tahap formulasi, para analis mengidentifikasi kemungkinan kebijakan yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah;

3. Adopsi Kebijakan

Adopsi kebijakan merupakan tahap dimana ditentukan pilihan kebijakan melalui dukungan dari para administrator dan legislatif;

4. Implementasi Kebijakan

Implementasi kegiatan merupakan suatu tahap dimana kebijakan yang telah diadopsi, dilaksanakan oleh unit-unit administratif tertentu dengan memobilisasi sumber daya yang ada.

5. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi merupakan tahap akhir untuk menilai kebijakan, apakah semua proses implementasi yang dilakukan oleh unit-unit yang telah ditentukan sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak (Keban, 2019).

1.6.5 Implementasi Kebijakan Publik

Gordon (1986) mengartikan implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan, dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi (Keban, 2019). Terdapat tiga generasi dalam perkembangan studi implementasi kebijakan. Generasi pertama (1970) memahami implementasi wacana antara kebijakan dan pelaksanaannya. Generasi kedua (1980) mempercayai bahwa implementasi kebijakan merupakan proses *top-down*, karena struktur hierarki birokrasi, atau lebih dikenal dengan perspektif pelaksana *top-down*. Pada generasi ketiga, Malcom L. Goggin (1990) memberi gagasan bahwa perilaku sebagai variabel dari pengimplementasi kebijakan lebih menentukan keberhasilan dan kegagalan dari implementasi kebijakan (Nugroho, 2015).

D.L Weimer dan Aidan R. Vining (1999) dalam Keban (2019) menyatakan ada tiga faktor umum yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu (1) logika yang digunakan oleh suatu kebijakan, yaitu seberapa benar teori yang menjadi landasan kebijakan dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan; (2)

hakekat kerjasama yang dibutuhkan, apakah semua pihak yang terlibat melakukan kerjasama merupakan kumpulan yang produktif; dan (3) ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan komitmen untuk mengelola pelaksanaannya.

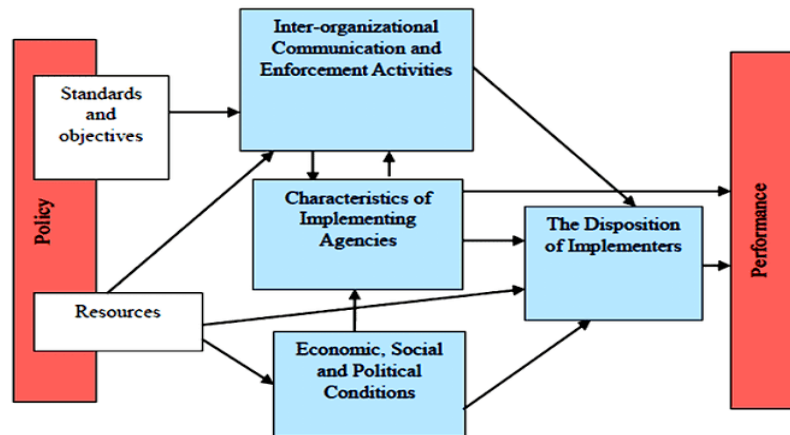
Agustino (2008) dalam Nugraha et al., (2024) merumuskan terdapat empat hal yang dapat diidentifikasi sebagai bahan evaluasi dan penilaian suatu implementasi kebijakan, yaitu : (1) adanya tujuan dan sasaran kebijakan; (2) adanya aktivitas atau kegiatan dalam mencapai tujuan; (3) adanya agen/actor pelaksana; dan (d) adanya hasil kegiatan.

Perkembangan studi implementasi kebijakan public mendorong para ahli untuk mengembangkan model-model implementasi kebijakan public, berikut ini merupakan model implementasi kebijakan dari beberapa ahli :

1) Model Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975)

Model ini merupakan model implementasi kebijakan klasik. Model ini mengasumsikan bahwa implementasi kebijakan bekerja sejalan dengan proses kebijakan (Nugroho, 2015). Beberapa variabel yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan adalah 1) ukuran/ standar dan sasaran/ tujuan kebijakan; 2) sumber daya; 3) karakteristik agen pelaksana; 4) komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas; 5) kondisi lingkungan politik, sosial, dan ekonomi; 6) sikap atau disposisi agen pelaksana (Nugraha et al., 2024). Model Van Meter dan Van Horn jika digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1. 2 Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

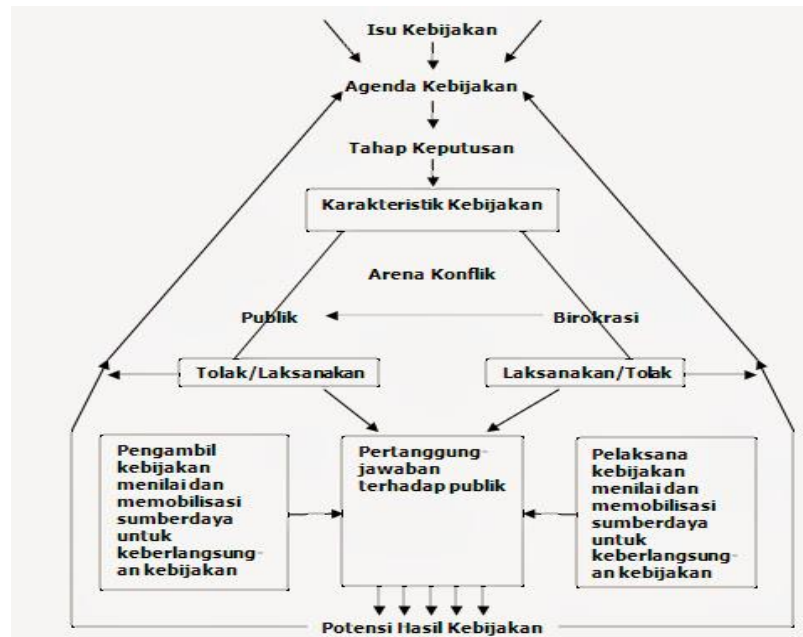


Sumber : Nugroho (2015) hal. 220

2) Model Merilee S. Grindle (1980)

Model ini juga merupakan model dengan pendekatan *top-down*. Grindle menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tergantung pada isi dan konteks implementasi kebijakan itu sendiri. Isi kebijakan (*content of policy*) meliputi : kepentingan yang terpengaruh dan mempengaruhi kebijakan, tipe/jenis manfaat yang dihasilkan, derajat perubahan yang ingin dicapai, letak kedudukan pengambil keputusan, pelaksana program, dan sumber daya yang digunakan. Sedangkan lingkungan kebijakan (*context of implementation*) mencakup kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat; karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa; kepatuhan dan daya tanggap. Pemahaman yang holistik dan komprehensif akan lingkungan suatu kebijakan diimplementasikan menjadi keistimewaan dan kekuatan dari model Grindle ini (Nugraha et al., 2024).

Gambar 1. 3 Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle

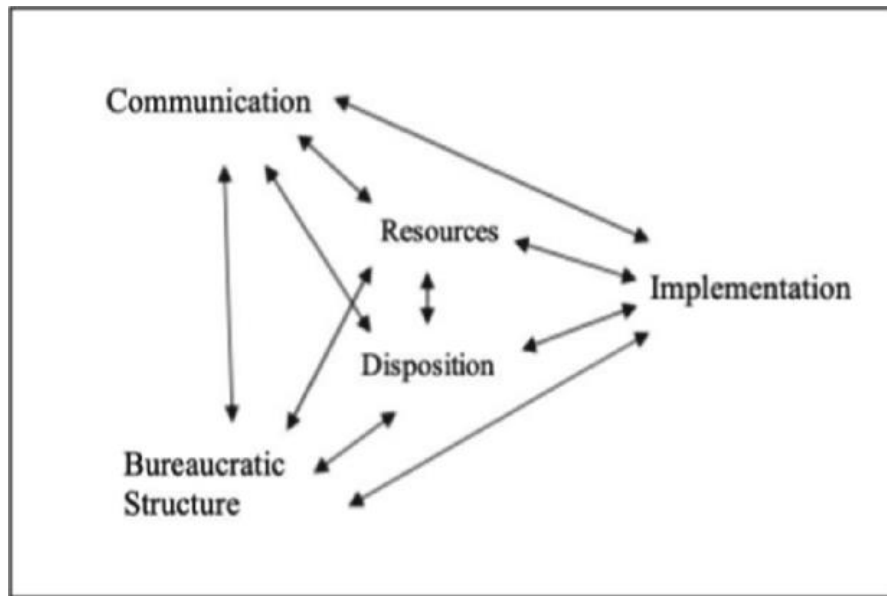


Sumber : Nugroho (2015) hal. 224

3) Model George Edward III (1980)

Edward mencatat bahwa isu utama kebijakan publik adalah kurangnya perhatian pada implementasi kebijakan, oleh karena itu Edward memberikan perhatian terhadap empat isu utama : komunikasi, sumber daya, disposisi sikap, dan struktur birokrasi. Komunikasi adalah bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada publik. Sumber daya menyangkut ketersediaan kompetensi sumber daya manusia, dan kapabilitas untuk melakukan kebijakan. Disposisi adalah ketersediaan aktor untuk melakukan implementasi kebijakan, dan struktur birokrasi merupakan suatu tantangan agar tidak menjadi fragmentasi birokrasi, karena dapat menurunkan efektivitas implementasi kebijakan (Nugroho, 2015).

Gambar 1. 4 Model Implementasi Kebijakan Edward III



Sumber : Nugraha et al., (2024) hal.71

4) Model Riant Nugroho

Di negara berkembang, kebijakan diimplementasikan sejajar dengan negara (pemerintah) dan masyarakat (rakyat, swasta) karena kebijakan publik merupakan titik bertemunya kepentingan kedua pelaku : negara dan masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat mencapai implementasi strategi kebijakan publik yang efektif, maka perlu adanya prinsip-prinsip kebijakan yang efektif. *Pertama*, kebijakan harus tepat, dinilai dengan seberapa banyak masalah dalam kebijakan yang perlu diselesaikan. *Kedua*, ketepatan pengimplementasi, sebagaimana pengimplementasian kebijakan tersebut berupa empat kategorisasi pengimplementasi yaitu : pemerintah sendiri, pemerintah sebagai aktor dominan dan masyarakat sebagai partner minoritas, pemerintah sebagai minoritas dan masyarakat sebagai aktor dominan, dan masyarakat sendiri. *Ketiga*, adalah ketepatan target kebijakan, apakah target sesuai dengan perencanaan, apakah terdapat

tumpang tindih dengan kebijakan lain, apakah perlu adanya implementasi baru, diperbarui, atau dimodifikasi. *Keempat*, ketepatan lingkungan, bahwa ketepatan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh lingkungan internal (interaksi perumus dan pengimplementasi kebijakan) dan lingkungan eksternal (opini dan persepsi publik). *Kelima*, ketepatan keputusan atau ketepatan proses, dimana implementasi kebijakan meliputi (1) penerimaan kebijakan, berkaitan dengan pemahaman publik bahwa kebijakan adalah aturan untuk mengelola masa depan; (2) adopsi kebijakan, bahwa publik setuju dan mendukung kebijakan, dan (3) kesiapan strategis, berkaitan dengan kesiapan publik untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan dan birokrat siap untuk menjadi pengimplementasi pertama.

Untuk lebih memahami konsep implementasi kebijakan, selanjutnya dilakukan sintesis analisis dari tiga model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh empat pakar di atas, sebagaimana dalam matriks berikut :

Tabel 1. 5 Matriks Sintesis Analisis Teori

Pakar	Pengertian
Van Meter dan Van Horn	Beberapa variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan diantaranya : 1) ukuran/standar dan sasaran/tujuan; 2) sumber daya; 3) karakteristik agen pelaksana; 4) komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas; 5) kondisi lingkungan, sosial, politik, dan ekonomi; 6) sikap atau disposisi agen pelaksana.
Grindle	Keberhasilan implementasi kebijakan tergantung pada isi (Content of policy) dan lingkungan kebijakan (context of policy). Isi kebijakan meliputi : kepentingan yang terpengaruh dan mempengaruhi kebijakan, tipe/jenis manfaat yang dihasilkan, derajat perubahan yang ingin dicapai, letak kedudukan pengambil keputusan, pelaksana program, dan sumber daya yang digunakan. Sedangkan lingkungan kebijakan (context of implementation) mencakup kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat; karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa; kepatuhan dan daya tanggap.
Edwards III	Isu utama dalam implementasi kebijakan adalah perhatian terhadap : komunikasi, sumber daya, disposisi sikap, dan struktur birokrasi.

Sumber : diolah peneliti, 2024

Berdasarkan teori-teori di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik yang efektif dipengaruhi oleh adanya : 1) ukuran/ standar dan tujuan kebijakan; 2) sumber daya; 3) komunikasi antar organisasi; 4) karakteristik agen pelaksana; dan 5) disposisi/sikap agen pelaksana. Oleh karena itu, peneliti menggunakan kelima variabel tersebut untuk menggali apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan kurikulum merdeka di SMA Negeri 1 Grabag.

1.6.6 Konsep Kebijakan Kurikulum Merdeka

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, dimana materi mata pelajaran akan dioptimalkan agar siswa memiliki waktu yang cukup untuk mendalami konsep dan memperkuat kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat pengajaran agar pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan minat belajar siswa.

Kebijakan tentang penerapan Kurikulum Merdeka diatur dalam Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Peraturan ini memuat lima bab yang meliputi : 1) ketentuan umum; 2) cakupan kurikulum; 3) implementasi kurikulum merdeka; 4) ketentuan peralihan; dan 5) penutup. Kurikulum Merdeka dalam peraturan tersebut adalah kurikulum yang memberi fleksibilitas dan berfokus pada materi esensial

untuk mengembangkan kompetensi peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila.

Struktur kurikulum dalam Kurikulum Merdeka Belajar meliputi intakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar sesuai jadwal dan beban belajar pada struktur Kurikulum. Kokurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan intrakurikuler dalam rangka pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Sedangkan Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik secara optimal yang dilakukan dengan bimbingan dan pengawasan Satuan Pendidikan.

Implementasi Kurikulum Merdeka dilaksanakan oleh tiga lembaga yang masing-masing mempunyai tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pertama, pada tingkat pusat adalah pejabat pimpinan tinggi madya atau kementerian yang bertanggungjawab untuk menyediakan panduan, buku teks, perangkat ajar, sumber belajar dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, serta melakukan pendampingan, pemantauan, dan evaluasi secara berkala. Kedua, Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk menyusun dan menetapkan muatan lokal, memfasilitasi pengembangan perangkat ajar muatan lokal, memfasilitasi dan pendampingan kepada Kepala Satuan Pendidikan dan pendidik dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Ketiga, Satuan Pendidikan yang bertanggungjawab untuk menyusun dan menetapkan Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP), menyediakan program

layanan khusus, melakukan refleksi, evaluasi dan perbaikan kurikulum, serta berpartisipasi aktif dalam komunitas belajar.

1.6.7 Operasionalisasi Konsep

Berdasarkan fenomena permasalahan yang ada, dengan mempertimbangkan penelitian terdahulu, serta teori berkaitan dengan implementasi kebijakan publik, maka selanjutnya peneliti mengoperasionalkan konsep penelitian. Operasionalisasi konsep merupakan suatu proses mengubah konsep abstrak menjadi fenomena yang dapat diukur dan diamati. Dalam operasonalisasi konsep ini, peneliti mengamati fenomena yang akan diteliti dan menghubungkan dengan variabel pada teori yang digunakan, hal ini akan memudahkan peneliti untuk melakukan analisa.

Sesuai dengan judul penelitian, yaitu Implementasi Kurikulum Merdeka di SMA Negeri 1 Grabag Kabupaten Magelang. Maka peneliti menggali mengenai implementasi kebijakan kurikulum merdeka dengan menganalisis Peremendikbud Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, khususnya pada bab III tentang Implementasi Kurikulum Merdeka. Dalam menganalisis implementasi dari peraturan tersebut, peneliti menggunakan teori ketepatan implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Riant Nugroho (2015), serta menggali faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn (1975), Grindle (1980), dan Edward III (1980) dengan menggunakan variabel standar dan tujuan kebijakan,

sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik lembaga, dan sikap/disposisi pelaksana kebijakan.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, untuk mencapai implementasi kebijakan strategis yang efektif, maka kebijakan yang ditetapkan harus tepat kebijakan, tepat pengimplementasian, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat keputusan atau tepat proses. Dari kelima ketepatan kebijakan yang dikembangkan oleh Riant Nugroho tersebut, penelitian ini menggali bagaimana ketepatan kebijakan implementasi kurikulum merdeka ini, dengan mengintegrasikan substansi Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 pada variabel ketepatan proses, yang meliputi penerimaan kebijakan (*policy acceptance*), adopsi kebijakan (*policy adoption*), dan kesiapan strategis (*strategic readiness*).

Adapun hal-hal atau aspek-aspek yang digali dari variabel ketepatan yang harus dipenuhi dalam implementasi kebijakan tersebut diantaranya sebagai berikut :

1) Ketepatan Kebijakan

Dari variabel ini, penelitian ini menggali bagaimana kesesuaian muatan kebijakan dengan permasalahan yang dipecahkan;

2) Ketepatan Pelaksanaan

Dengan variabel ketepatan pelaksanaan, penelitian ini menggali ketepatan kategori/jenis pelaksanaan;

3) Ketepatan Target

Dengan variabel ketepatan target, penelitian ini menggali sifat intervensi implementasi kebijakan apakah merupakan kebijakan baru atau memperbarui, bagaimana kesesuaian program yang dilaksanakan, dan kesiapan target intervensi kebijakan;

4) Ketepatan Lingkungan

Ketepatan lingkungan digunakan untuk mengetahui bagaimana interaksi pelaksana kegiatan dengan lembaga lain yang mempunyai peran penting dalam pelaksanaan kebijakan;

5) Ketepatan Proses

Sebagaimana dijelaskan bahwa dalam ketepatan keputusan terdapat tiga proses agar kebijakan ini menjadi efektif. *Pertama*, penerimaan kebijakan (*policy acceptance*), dari variabel ini penelitian ini menggali bagaimana pemahaman implementor tentang tanggung jawab masing-masing dengan mengintegrasikan substansi peraturan yang termasuk dalam kategori penerimaan kebijakan. *Kedua*, adopsi kebijakan (*policy adoption*) untuk menilai apakah implementor kebijakan mendukung dan melaksanakan kebijakan kurikulum merdeka sesuai dengan peraturan. *Ketiga*, kesiapan strategis untuk menggali kesiapan implementor (sekolah) berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan.

Kemudian untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di SMA Negeri 1 Grabag, peneliti menggunakan beberapa variabel yang diperoleh dari perbandingan teori implementasi kebijakan publik oleh Van Meter Van Horn, Grindle, dan Edward III. Adapun variabel yang dipilih adalah variabel yang beririsan dan relevan

dengan fokus dan lokus dari penelitian. Variabel yang digunakan dari ketiga teori model implementasi kebijakan tersebut diantaranya :

1. Standar dan tujuan kebijakan;

Dari variabel ini peneliti menggali standar yang digunakan dalam menerapkan kurikulum merdeka dan ketercapaian visi organisasi dalam implementasi kurikulum merdeka.

2. Sumber daya;

Variabel sumber daya digunakan untuk menggali berapa banyak sumber daya yang tersedia, meliputi pelaksana, biaya, dan fasilitas sarana prasarana yang tersedia untuk mendukung implementasi kebijakan.

3. Karakteristik agen pelaksana;

Variabel ini digunakan untuk mengetahui siapa saja agen pelaksana kebijakan yang terlibat, dan apa tugas pokok masing-masing agen pelaksana.

4. Komunikasi antar organisasi;

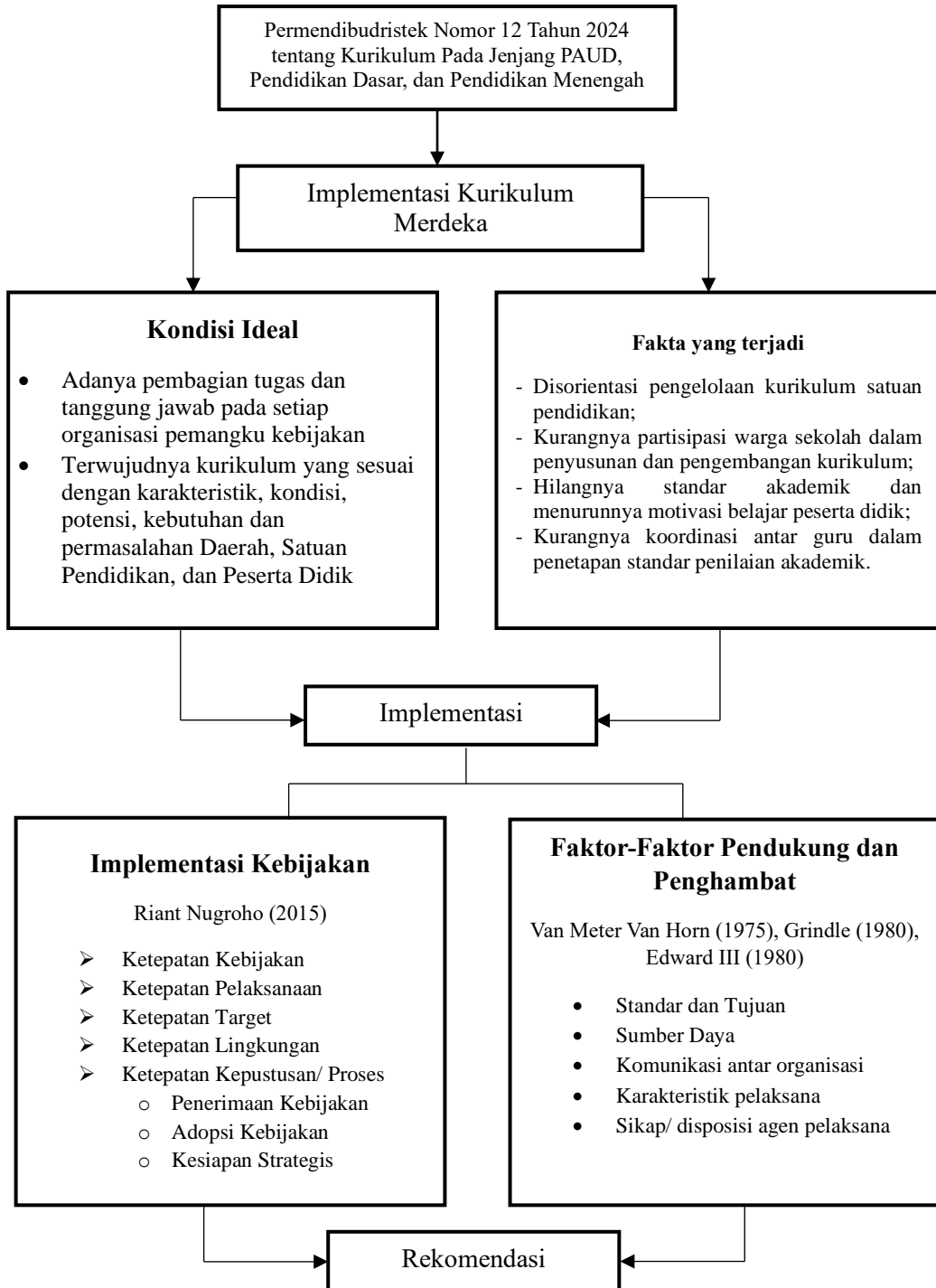
Komunikasi antar organisasi diperlukan untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan, terlebih organisasi yang terlibat dalam kebijakan kurikulum merdeka berjenjang. Sehingga peneliti ingin menggali bagaimana proses penyampaian informasi dan kejelasan penerimaan informasi pada pelaksana kebijakan.

5. Sikap/ disposisi agen pelaksana;

Disposisi didefinisikan sebagai sikap atau karakter implementor, maka peneliti ingin menggali seberapa jauh komitmen dan hasil kinerja yang dicapai oleh implementor kebijakan.

1.6.8 Kerangka Berpikir Penelitian

Gambar 1. 5 Kerangka Berpikir Penelitian



Sumber : diolah peneliti, 2024

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu acara atau proses yang dipilih peneliti untuk menggali informasi dan menyelesaikan masalah dalam penelitian secara rasional, empiris dan sistematis untuk mendapatkan data yang valid, sehingga peneliti dapat menemukan, membuktikan dan atau mengembangkan pengetahuan tertentu berkaitan dengan penelitian ini. Adapun secara rinci metode penelitian yang digunakan dijelaskan sebagai berikut.

1.7.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang berawal dari proses berpikir manusia karena rasa keingin tahu dan keraguan pada suatu hal yang menyebabkan manusia ingin mencari tahu jawaban akan kebenaran dari hal-hal tersebut (Hikmawati, 2020). Dalam menggali jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Sugiyono, (2015) menyebut metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*).

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, melainkan menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel atau kejadian. Penelitian deskriptif ini dipahami sebagai penelitian yang berusaha menggambarkan dan melukiskan sebuah keadaan atas fakta-fakta yang benar-benar terjadi sehingga peneliti dapat memahami fenomena yang menjadi permasalahan dalam penelitian (Sahir, 2022).

Pendekatan metode kualitatif deskriptif dipilih karena semua hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dapat dikonstruksi dengan detail dari

setiap informan. Setiap informan tentunya memiliki interpretasi sendiri terhadap penerapan kebijakan kurikulum merdeka. Pendekatan dengan metode kualitatif deskriptif juga menekankan pada pengamatan suatu fenomena, sehingga dengan metode ini peneliti dapat menganalisis lebih mendalam.

1.7.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini bertujuan untuk memberi batasan studi kualitatif, membatasi objek penelitian, dan menggali data yang relevan sesuai tujuan penelitian. Penelitian ini berfokus untuk meneliti bagaimana implementasi kebijakan publik yang dilaksanakan pada tingkat daerah, berdasarkan isi kebijakan yang bersumber dari Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024, khususnya pada BAB III bagian kesatu mengenai tanggung jawab organisasi pada tingkat Pemerintah Daerah dan satuan Pendidikan, dan bagian kedua tentang Kurikulum Satuan Pendidikan, serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan.

Dalam menganalisis implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka menggunakan teori ketepatan implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Riant Nugroho (2015). Sedangkan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan menggunakan analisis variabel model implementasi kebijakan klasik yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn (1975), Grindle (1980) dan Edward III (1980) dengan penggunaan variabel standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik lembaga, dan sikap/disposisi agen pelaksana. Alasan penggunaan teori ini karena sesuai dengan tujuan pertama untuk menganalisis ketepatan

kebijakan dari isi kebijakan, dan tujuan kedua menganalisis faktor pendukung dan penghambat menggunakan variabel yang dipilih sesuai analisis teori dan relevan dengan kondisi lapangan.

1.7.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di SMA Negeri 1 Grabag, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, yang merupakan sekolah negeri yang sudah menerapkan Kebijakan Kurikulum Merdeka mulai tahun pelajaran 2022/2023. SMA Negeri 1 Grabag telah melaksanakan Kurikulum Merdeka sesuai dengan ketentuan, prinsip-prinsip, dan tanggung jawab satuan Pendidikan. Namun dalam praktiknya, implementasi kurikulum merdeka ini masih menimbulkan permasalahan yang perlu diselesaikan, pelaksanaan program kegiatan pembelajaran masih kurang tepat sasaran karena kurangnya koordinasi antar pemangku kebijakan dan menurunnya motivasi belajar peserta didik. Alasan tersebut membuat peneliti tertarik untuk mengkaji implementasi dan faktor yang mendukung serta menghambat implementasi kebijakan kurikulum merdeka di tingkat satuan Pendidikan.

1.7.4 Fenomena Penelitian

Fenomena penelitian merupakan hal-hal yang diamati dalam penelitian. Adapun dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati tentang Implementasi Kurikulum Merdeka di SMA Negeri 1 Grabag, Kabupaten Magelang dan faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam penerapan kebijakan tersebut berdasarkan tujuan dan teori yang digunakan untuk meneliti fenomena tersebut. Untuk memudahkan dalam memahami fenomena penelitian, peneliti merangkum dalam sebuah matriks yang terbagi menjadi fenomena, sub fenomena, dan operasionalisasi. Fenomena merupakan turunan dari tujuan

penelitian, sub fenomena merupakan variabel dari teori yang digunakan, dan operasionalisasi merupakan hal-hal yang akan digali dalam penelitian.

Tabel 1. 6 Matriks Fenomena Penelitian

Fenomena	Sub Fenomena	Operasionalisasi
Implementasi Kebijakan		
Ketepatan Implementasi Kebijakan	Ketepatan kebijakan	- Kesesuaian muatan kebijakan dengan permasalahan yang dipecahkan
	Ketepatan pelaksanaan	- Menganalisis ketepatan kategori/jenis pelaksanaan
	Ketepatan target	- Sifat intervensi implementasi kebijakan, baru atau memperbaiki - Kesesuaian kebijakan dengan program yang dilaksanakan - Kesiapan target intervensi kebijakan
	Ketepatan lingkungan	- Menganalisis interaksi pelaksana kebijakan dengan lembaga lain
	Ketepatan keputusan/proses	
	Penerimaan Kebijakan	- Pemahaman implementor tentang tanggungjawab <ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi aktif Satuan Pendidikan dalam komunitas belajar • Satuan pendidikan menyusun dan menetapkan Kurikulum Satuan Pendidikan • Keterlibatan Komite dan masyarakat dibawah supervisi Dinas Pendidikan dalam penyusunan Kurikulum Satuan Pendidikan
	Adopsi Kebijakan	- Dukungan dan penerapan kebijakan <ul style="list-style-type: none"> • Pemda menyusun dan menetapkan muatan lokal • Fasilitasi Pemda dalam pengembangan perangkat ajar muatan lokal • Fasilitasi dan pendampingan Pemda dalam Implementasi Kurikulum Merdeka ke Satuan Pendidikan , peningkatan kualitas pembelajaran, dan mengaktifkan komunitas belajar • Kesesuaian Kurikulum Satuan Pendidikan yang disusun Satuan Pendidikan dengan panduan pengembangan kurikulum dengan menerapkan prinsip diversifikasi

		potensi daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik
	Kesiapan Strategis	- Satuan Pendidikan melakukan refleksi, evaluasi, dan perbaikan implementasi kurikulum satuan pendidikan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran
Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan		
Faktor pendukung dan penghambat implementasi	Standar dan Tujuan	- Standar yang digunakan dalam menerapkan kurikulum merdeka - Ketercapaian visi misi organisasi
	Sumber Daya	- Ketersediaan sumber daya pelaksana - Ketersediaan anggaran - Ketersediaan fasilitas/ sarana prasarana penunjang
	Komunikasi Antar Organisasi	- Proses penyampaian informasi - Kejelasan penerimaan informasi
	Karakteristik Lembaga	- Pelaksana yang terlibat dalam penerapan kebijakan - Tugas dan fungsi masing-masing pelaksana kebijakan
	Disposisi	- Komitmen pelaksana kebijakan - Hasil kinerja pelaksana kebijakan

Sumber : diolah peneliti, 2024

1.7.5 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga data yang ditampilkan berupa data kualitatif yang berbentuk kata-kata, kalimat, tabel, bagan, dan gambar. Data kualitatif tersebut dikumpulkan melalui kegiatan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data diperoleh dari sumber data primer dan sekunder.

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui pengamatan langsung dan hasil dari wawancara kepada informan terkait Implementasi Kurikulum Merdeka di SMA Negeri 1 Grabag. Peneliti juga melakukan observasi di lapangan terkait proses pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan kurikulum merdeka.

- 2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Data ini berupa dokumen-dokumen dan sumber kepustakaan (buku/jurnal/laporan/media), yang berkaitan dengan Implementasi Kurikulum Merdeka di SMA Negeri 1 Grabag.

1.7.6 Instrumen Penelitian

Penelitian bersifat *field research* merupakan ciri dari penelitian kualitatif. Oleh karena itu peneliti menggunakan pedoman wawancara yang bersifat terbuka sebagai instrument penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada informan dalam menyampaikan fenomena di lapangan, sehingga data yang didapatkan akan lebih mendalam dan kompleks. Peneliti menggunakan alat tulis, seperti buku dan bolpoin untuk mencatat, dan handphone sebagai alat dokumentasi dan perekam untuk mendukung pengumpulan data. Dengan adanya instrument penelitian ini akan memudahkan dalam menggali data dan informasi secara mendalam.

Dalam membuat pedoman wawancara, peneliti terlebih dahulu membuat pemetaan fenomena penelitian dan operasionalisasinya. Kemudian membuat daftar pertanyaan yang merujuk pada kesesuaian dengan informasi yang akan digali. Kemudian menentukan informan yang tepat dan memungkinkan dapat memberi informasi sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah dibuat. Berikut ini merupakan pemetaan pertanyaan dan daftar informan yang dibutuhkan.

Tabel

1.

7

Instrumen

Penelitian

No.	Fenomena	Sub Fenomena	Operasionalisasi	Pertanyaan	Informan											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka																
1		Ketepatan Kebijakan	Kesesuaian muatan kebijakan dengan permasalahan yang dipecahkan	Apakah sistem pendidikan saat ini sudah tepat untuk mengatasi permasalahan pendidikan saat ini atau belum?	v	v	v	v				v	v			
			Kesesuaian lembaga yang membuat kebijakan	Penerapan Kurikulum Satuan Pendidikan merupakan tanggung jawab Satuan Pendidikan? Apakah hal tersebut sudah sesuai?	v	v	v	v								
2		Ketepatan pelaksanaan	Menganalisis ketepatan kategori/jenis pelaksanaan	Siapakah yang lebih dominan dalam pelaksanaan kebijakan ini?	v	v	v	v				v				
3		Ketepatan target	Kesesuaian kebijakan dengan program yang dilaksanakan	Apakah program kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan panduan kebijakan?	v	v	v	v					v			
			Kesiapan target intervensi kebijakan	Apakah sekolah sudah siap untuk melaksanakan kurikulum merdeka?	v	v	v	v			v	v	v			
				Apakah peserta didik sudah siap melaksanakan kurikulum merdeka?	v	v		v	v							
			Sifat intervensi implementasi kebijakan, baru atau memperbarui	Apakah kebijakan ini memperbaiki kebijakan sebelumnya atau sebuah kebijakan baru?	v	v	v	v								
4		Ketepatan lingkungan	Interaksi perumus kebijakan dengan pelaksana (internal)	Adakah panduan atau pedoman dari pemerintah pusat dalam implementasi kurikulum merdeka?	v	v	v	v			v		v			
				Adakah koordinasi antara sekolah dengan pemda (cabang dinas) dalam implementasi kurikulum merdeka?		v	v	v						v		
			Persepsi publik terhadap kebijakan dan implementasinya (eksternal)	Bagaimana peran orangtua dalam implementasi kebijakan kurikulum merdeka?		v	v	v						v		
				Adakah koordinasi antara orangtua dan sekolah?		v		v						v		
				Apakah pernah ada penolakan dari orangtua/ peserta didik terkait penerapan kurikulum merdeka?		v		v						v	v	
			Apakah peserta didik senang dengan kurikulum merdeka?	v				v				v				
5		Ketepatan Keputusan/ Proses	Penerimaan Kebijakan	Pemahaman implementor tentang tanggungjawab :												
				Partisipasi aktif Satuan Pendidikan dalam komunitas belajar	Apakah guru aktif dalam komunitas belajar?	v	v	v	v							
				Satuan pendidikan menyusun dan menetapkan Kurikulum Satuan Pendidikan	Komunitas belajar yang diselenggarakan apakah internal satuan pendidikan atau antar satuan pendidikan?	v	v	v	v							
				Keterlibatan Komite dan masyarakat dibawah supervisi Dinas Pendidikan dalam penyusunan Kurikulum Satuan Pendidikan	Apakah satuan pendidikan sudah menyusun dan menetapkan kurikulum satuan pendidikan?	v	v	v	v					v		
				Adopsi Kebijakan	Apakah komite dan masyarakat terlibat dalam penyusunan kurikulum satuan pendidikan?		v		v					v	v	
					Apakah pengawas memfasilitasi penyusunan kurikulum satuan pendidikan?		v	v	v					v		
					Dukungan dan penerapan kebijakan :											
					Pemda menyusun dan menetapkan muatan lokal	Apakah pemerintah daerah sudah menetapkan muatan lokal dalam implementasi kurikulum merdeka	v	v	v							
					Fasilitasi Pemda dalam pengembangan perangkat ajar muatan lokal	Apakah cabang dinas memfasilitasi pengembangan perangkat ajar muatan lokal?	v	v	v	v						
					Fasilitasi dan pendampingan Pemda dalam Implementasi Kurikulum Merdeka ke Satuan Pendidikan	Apakah muatan lokal yang ditetapkan menerapkan prinsip diversifikasi?	v	v	v							
				Kesiapan Strategis	Pemda memfasilitasi pendidik dan Kepala Satuan Pendidikan dalam IKM dan peningkatan kualitas pembelajaran	Apakah cabang dinas mendampingi satuan pendidikan dalam menerapkan IKM?	v	v	v	v						
					Pemda memfasilitasi pendidik dan Kepala Satuan Pendidikan dalam mengaktifkan komunitas belajar	Apakah cabang dinas mendampingi satuan pendidikan dalam peningkatan kualitas pembelajaran? Dengan cara apa saja?	v	v	v	v						
Kesesuaian Kurikulum Satuan Pendidikan yang disusun Satuan Pendidikan dengan panduan <u>nenebanan kurikulum</u>	Apakah kurikulum satuan pendidikan yang disusun sudah sesuai dengan panduan yang diberikan oleh kementerian?	v	v		v	v										
Kesesuaian pengembangan Kurikulum Satuan Pendidikan	Apakah dalam pengembangan kurikulum satuan pendidikan sudah menerapkan prinsip diversifikasi?	v	v		v	v					v					
			Satuan Pendidikan melakukan refleksi, evaluasi, dan perbaikan implementasi kurikulum satuan pendidikan untuk memperbaiki kualitas	Apakah satuan pendidikan secara rutin melaksanakan refleksi, evaluasi, dan perbaikan implementasi kurikulum merdeka?	v	v	v	v			v	v	v			

Faktor Pendukung dan Penghambat Kebijakan Kurikulum Merdeka											
6	Standar dan Tujuan	Standar yang digunakan dalam menerapkan kurikulum merdeka	Apakah ada SOP dalam implementasi kurikulum merdeka?	v	v	v	v				
		Tujuan organisasi	Apakah tujuan yang ditetapkan dapat mendorong implementasi kebijakan kurikulum merdeka?	v	v	v	v			v	
			Apakah tujuan yang ditetapkan sudah merepresentasikan capaian pembelajaran kurikulum merdeka?	v	v	v	v			v	
7	Sumber Daya	Ketersediaan sumber daya pelaksana	Apakah kuantitas dan kualifikasi guru yang tersedia sudah sesuai dengan kebutuhan?		v		v		v		
			Adakah perbedaan kualitas peserta didik sebelum dan sesudah kurikulum merdeka ini diterapkan?	v	v		v				
		Ketersediaan anggaran	Apakah anggaran yang tersedia cukup untuk melaksanakan implementasi kurikulum merdeka?				v		v	v	
		Ketersediaan fasilitas/ sarana prasarana penunjang	Apakah fasilitas yang tersedia cukup menunjang untuk penerapan kurikulum merdeka?	v				v	v		v
Adakah kendala yang dihadapi terkait dengan sumber daya?	v		v		v	v			v	v	
8	Komunikasi Antar Organisasi	Proses penyampaian informasi	Apakah cabang dinas memberikan sosialisasi terkait program-program yang harus dikerjakan dalam mendukung implementasi kurikulum merdeka?	v	v	v	v				
			Apakah sekolah memberikan informasi berkaitan dengan program kerja dalam implementasi kurikulum merdeka?	v	v		v				v
		Kejelasan penerimaan informasi	Apakah guru sudah memahami penerapan kurikulum merdeka dan tugas administratif lain yang berhubungan dengan IKM?	v		v	v				
			Hubungan antar organisasi	Apakah satuan pendidikan mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua dan komite?				v			v
Apakah satuan pendidikan melaksanakan konsultasi dengan Cabang Dinas ketika ada kendala yang dihadapi di lapangan terkait dengan IKM?	v	v		v	v					v	
9	Karakteristik Lembaga	Pelaksana yang terlibat dalam penerapan kebijakan	Siapa saja stakeholder yang terlibat dalam penyusunan kurikulum satuan pendidikan?	v	v	v	v			v	
		Tugas dan fungsi masing-masing pelaksana kebijakan	Bagaimana pembagian tugas yang dilakukan untuk mendukung penerapan kurikulum merdeka?	v		v	v				v
			Adakah kendala yang dihadapi masing-masing pelaksana dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka?	v	v	v	v	v	v		
10	Disposisi/ Sikap Pelaksana	Komitmen pelaksana kebijakan	Sebagai pendidik, apakah anda setuju dengan system pembelajaran yang diterapkan pada kurikulum merdeka ini? Ana alasannya?	v	v		v				
			Apakah atasan Bapak/Ibu selalu melaksanakan supervisi terhadap tugas Bapak/Ibu?	v	v		v				
			Apakah semua guru melaksanakan pembelajaran dengan baik? Adakah guru yang sering meninggalkan jam pelajaran tanna alasan?	v			v	v			
		Tanggungjawab pelaksana kebijakan	Apabila ada guru yang izin, apakah peserta didik diberikan tugas pengganti?	v	v		v	v			
		Hasil kinerja pelaksana kebijakan	Apakah Bapak/Ibu melaporkan hasil kerja? Dalam bentuk apa?	v	v		v				

Sumber : diolah peneliti, 2024

Keterangan Informan :

1 : Guru, 2 : Waka Kurikulum, 3 : Pengawas SMA, 4 : Kepala Sekolah, 5 : Peserta Didik, 6 : Tata Usaha, 7 : Komite, 8 : Orangtua peserta didik, 9 : Bendahara BOS

1.7.7 Pemilihan Informan

Pada penelitian ini, ada dua teknik penentuan informan yang digunakan, yaitu *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Pertama, *purposive sampling* adalah teknik pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu, peneliti menentukan informan yang sesuai terhadap suatu fenomena untuk mencapai tujuan penelitian (Sugiyono, 2015). Pada konteks ini, penentuan informan langsung dipilih oleh peneliti, dengan pertimbangan bahwa merekalah yang mengetahui informasi penelitian. Sebagaimana dalam Tabel 1.7 dalam pemetaan instrument penelitian, terdapat Sembilan (9) informan, yang terdiri dari delapan (8) informan yang telah ditentukan (*purposive sampling*), dan satu (1) informan merupakan informan tambahan (*snowball sampling*).

Terdapat dua kriteria informan dalam *purposive sampling*, yaitu informan kunci dan informan pendukung. Informan kunci terdiri dari Guru, Kepala Sekolah, Waka Kurikulum, dan Pengawas SMA.

1. Informan Kunci Penelitian

Kriteria-kriteria yang ditentukan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a) Guru, merupakan pelaksana kebijakan utama dalam implementasi kurikulum merdeka, maka menjadi sumber data dari penelitian ini;
- b) Waka Kurikulum, sebagai koordinator pelaksanaan sistem pembelajaran di satuan pendidikan, Waka Kurikulum mempunyai peran penting dalam penerapan dan manajemen kebijakan kurikulum merdeka;

- c) Pengawas SMA sebagai informan dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII dalam hal ini mewakili Pemerintah Daerah, menjadi informan kunci untuk memperoleh informasi berkaitan dengan tanggungjawab pemerintah daerah.
- d) Kepala Sekolah, merupakan pimpinan tertinggi di satuan pendidikan yang setiap kebijakan dan kebijaksanaannya akan berpengaruh terhadap implementasi kebijakan dalam penelitian ini;

2. Informan Pendukung Penelitian

Informan pendukung sama halnya dengan informan kunci, dipilih sesuai kriteria-kriteria yang diharapkan peneliti. Adapun kriteria informan pendukung yang ditetapkan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

- a) Peserta Didik, merupakan objek dari implementasi kurikulum merdeka. Informan ini terpilih karena sesuai dengan informasi yang akan digali dalam penelitian ini salah satunya kesiapan intervensi kebijakan;
- b) Tata Usaha, merupakan informan pendukung terpilih untuk menggali informasi ketersediaan sumber daya yang ada di satuan pendidikan;
- c) Komite, sebagai informan pendukung yang penting untuk menggali informasi berkaitan dengan keterlibatan komite dan masyarakat dalam penyusunan kurikulum satuan pendidikan;
- d) Orangtua Peserta Didik, sebagai informan yang mewakili masyarakat, informasi dari orangtua peserta didik dibutuhkan untuk menggali informasi berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kurikulum satuan pendidikan.

Kedua adalah teknik *snowball sampling*. *Snowball sampling* adalah bermula dari pengambilan sampel sumber data yang sedikit atau praktis dari informan awal, kemudian dilanjutkan ke informan lain dan menjadi besar (Sugiyono, 2015). Teknik ini digunakan ketika informan awal tidak memahami tentang informasi yang digali. Penggunaan Teknik *snowball sampling* dalam penelitian ini digunakan untuk melakukan wawancara kepada bendahara sekolah untuk menggali informasi yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya anggaran. Pada awalnya pertanyaan penelitian berkaitan dengan sumber daya anggaran ditanyakan kepada tenaga kependidikan (Kepala Tata Usaha), namun karena Kepala Tata Usaha tidak membidangi urusan ketersediaan anggaran secara spesifik, kemudian mengarahkan peneliti untuk melakukan wawancara dengan bendahara sekolah. Dari penggunaan dua teknik tersebut, diuraikan jumlah infroman sebagai berikut :

Tabel 1. 8 Informan Penelitian

Kategori	Jabatan/ Posisi	Instansi
Informan 1	Guru Bahasa Inggris	SMA Negeri 1 Grabag
Informan 2	Guru Bahasa Jawa	SMA Negeri 1 Grabag
Informan 3	Guru Pendidikan Agama Islam	SMA Negeri 1 Grabag
Informan 4	Guru Fisika/ Tim Kurikulum	SMA Negeri 1 Grabag
Informan 5	Kepala Sekolah	SMA Negeri 1 Grabag
Informan 6	Waka Kurikulum	SMA Negeri 1 Grabag
Informan 7	Pengawas SMA	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII
Informan 8	Plt. Kepala Tata Usaha	SMA Negeri 1 Grabag
Informan 9	Peserta Didik	SMA Negeri 1 Grabag
Informan 10	Peserta Didik	SMA Negeri 1 Grabag
Informan 11	Komite Sekolah	
Informan 12	Orangtua Peserta Didik	
Informan 13	Bendahara BOS	SMA Negeri 1 Grabag

Sumber : data diolah peneliti, 2024

Jumlah informan dalam penelitian ini adalah tiga belas (13) orang, yang terdiri dari informan pihak pemerintah daerah, dalam hal ini Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII 1 orang, dari pihak satuan Pendidikan 10 orang, komite 1 orang, dan orangtua peserta didik 1 orang. Dalam penelitian ini, pemetaan kebutuhan data dilakukan, untuk menyesuaikan data yang dibutuhkan dari setiap informan, dan menghindari data yang tertinggal dan bias.

1.7.8 Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Observasi menjadi penting untuk mendapatkan informasi, dalam meneliti ada kalanya penting untuk melihat perilaku alamiah dalam keadaan (setting) alamiah, melihat dinamika, melihat gambaran perilaku berdasarkan situasi yang ada (Black & Champion, 2009). Jenis observasi yang dipilih yaitu observasi partisipan dan sistematis, dimana peneliti merupakan bagian dari keadaan alamiah tempat dilakukannya observasi. Menurut Reiss (1971), observasi sistematis bermaksud mengamati dan mencatat menurut prosedur eksplisit yang memungkinkan dilakukannya replikasi.

Peneliti melakukan observasi di SMA Negeri 1 Grabag dengan mengamati pelaksanaan pembelajaran menggunakan kurikulum merdeka, ketersediaan sumber daya pendukung pembelajaran, interaksi dan komunikasi antar pelaksana kebijakan. Penerapan kurikulum merdeka sudah cukup baik dan didukung dengan ketersediaan tenaga pendidik yang mencukupi, lingkungan belajar yang nyaman, dan sarana prasarana pendukung pembelajaran sudah cukup lengkap.

2) Wawancara

Black & Champion, (2009) mendefinisikan wawancara sebagai kegiatan komunikasi verbal dengan tujuan mendapatkan informasi. Wawancara dilakukan bukan hanya sekedar alat dan kajian studi, namun juga merupakan seni kemampuan sosial yang diperankan oleh peneliti dan informan. Sebagai fungsi deskripsi wawancara bermanfaat untuk menetapkan pemahaman ke dalam lingkungan terbatas dari realita sosial. Wawancara juga digunakan sebagai alat eksplorasi untuk kebutuhan khusus, seperti identifikasi variabel-variabel baru dan mempertajam kejelasan konsepsi.

Dalam praktiknya, wawancara dilakukan melalui diskusi dengan informan yang terpilih, merekam, mencatat, dan menggali data melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah ditetapkan. Seluruh pertanyaan pada saat wawancara diberikan untuk memperdalam informasi, hasil wawancara ditranskrip menjadi sebuah dokumen, kemudian dianalisa sehingga diperoleh hasil penelitian.

Persiapan Wawancara (Penelitian Lapangan)

Tahap awal penelitian lapangan, peneliti terlebih dahulu menyerahkan proposal penelitian dan surat izin penelitian kepada satuan pendidikan SMA Negeri 1 Grabag. Kemudian melakukan diskusi kecil dengan kepala sekolah berkaitan dengan topik yang akan diteliti dan kebutuhan data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam hal ini Kepala Sekolah sangat mendukung dan mengizinkan peneliti untuk melaksanakan wawancara kepada informan yang telah ditentukan dalam penelitian ini.

Wawancara dengan Pendidik (Guru)

Wawancara dengan guru dilakukan kepada empat informan guru, hal ini dilakukan karena menurut peneliti informasi yang akan digali perlu melibatkan guru mata pelajaran umum, guru muatan lokal, dan guru yang menjadi anggota tim kurikulum. Keempat informan tersebut adalah :

1. Informan 1, merupakan Guru Bahasa Inggris sekaligus Waka Hubungan Masyarakat. Melalui wawancara dengan beliau, peneliti menggali informasi berkaitan dengan pemahaman dan adopsi kebijakan kurikulum merdeka. Wawancara dilaksanakan pada hari Rabu, 30 Oktober 2024 selama 20 menit.
2. Informan 2, merupakan Guru Bahasa Jawa, yang dalam hal ini peneliti menggali tentang tanggung jawab pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam mengembangkan muatan lokal. Wawancara dilaksanakan pada hari Jumat, 25 Oktober 2024 selama 17 menit.
3. Informan 3, merupakan guru Pendidikan Agama Islam, melalui wawancara dengan beliau peneliti menggali informasi berkaitan dengan kesiapan satuan pendidikan dalam menerapkan Kurikulum Merdeka. Wawancara dilaksanakan pada hari Jumat, 25 Oktober 2024 selama 19 menit.
4. Informan 4, merupakan guru Fisika yang sekaligus menjabat sebagai tim kurikulum. Wawancara dilakukan pada hari Senin, 28 Oktober 2024 selama 19 menit untuk menggali informasi berkaitan dengan partisipasi pendidik dalam penerapan kurikulum merdeka.

Wawancara dengan Waka Kurikulum

Kunci utama keberhasilan implementasi kurikulum merdeka tidak lepas dari peran Waka Kurikulum sebagai *leader* yang mengatur berjalannya sistem pembelajaran di satuan pendidikan. Wawancara kepada Waka Kurikulum dilakukan pada hari Senin, 28 Oktober 2024 selama 30 menit dengan menggali informasi berkaitan dengan keseluruhan aspek yang diteliti dalam penelitian ini.

Wawancara dengan Kepala Sekolah

Sebagai *top leader* satuan pendidikan, segala kebijakan yang ditetapkan akan berpengaruh terhadap keberhasilan program yang dilaksanakan, sehingga peneliti membutuhkan informasi dari kepala sekolah berkaitan dengan implemementasi kebijakan kurikulum merdeka di satuan pendidikan. Wawancara kepada Kepala Sekolah dilakukan pada hari Kamis, 7 November 2024 bertempat di Ruang Kepala Sekolah selama 24 menit.

Wawancara dengan Pengawas SMA

Pelaksanaan wawancara dengan Pengawas SMA dilakukan dengan terlebih dahulu membuat janji dan menetapkan hari yang telah ditentukan yaitu Jumat, 15 November 2024. Wawancara dilaksanakan di sekolah karena pada saat yang bersamaan pengawas sedang melaksanakan pembinaan berkaitan dengan evaluasi rapor pendidikan SMA Negeri 1 Grabag.

Wawancara dengan Plt Kepala Tata Usaha

Wawancara kepada tenaga kependidikan, dalam hal ini Plt. Kepala Tata Usaha dilaksanakan pada Senin, 11 November 2024 selama 11 menit. Wawancara kepada tenaga kependidikan dilakukan untuk menggali data berkaitan dengan ketersediaan sumber daya pendukung implementasi kurikulum merdeka.

Wawancara dengan Peserta Didik

Wawancara kepada peserta didik dilakukan untuk menggali informasi persepsi pihak eksternal, sebagaimana peserta didik merupakan penerima kebijakan. Wawancara dilakukan kepada dua peserta didik secara bersamaan, peserta didik merupakan siswa kelas XII fase F. Wawancara dilakukan selama 15 menit pada Senin, 4 November 2024.

Wawancara dengan Komite Sekolah

Peneliti melakukan wawancara kepada Ketua Komite SMA Negeri 1 Grabag untuk memperoleh informasi perihal keterlibatan komite dan atau masyarakat pada penyusunan Kurikulum Satuan Pendidikan, sebagaimana ketentuan dalam peraturan. Wawancara dilaksanakan melalui telepon, dikarenakan jadwal yang berbenturan sehingga tidak bisa bertemu secara langsung. Diskusi yang dilakukan melalui telepon ini dilaksanakan pada Jumat, 8 November 2024 selama 15 menit.

Wawancara dengan Orangtua Peserta Didik

Kebutuhan informasi berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dilakukan dengan wawancara kepada salah satu orang tua peserta didik. Orang tua peserta didik yang diwawancara dipilih atas rekomendasi dari salah satu

informan guru. Wawancara kepada orang tua dilakukan dengan berkunjung ke rumah informan pada Jumat, 8 November 2024.

Wawancara dengan Bendahara BOS

Bendahara BOS merupakan informan tambahan dalam penelitian ini, atas rekomendasi dari Plt. Kepala Tata Usaha untuk menggali informasi yang lebih dalam berkaitan dengan ketersediaan sumber daya anggaran untuk melaksanakan kebijakan kurikulum merdeka. Wawancara dilaksanakan pada Rabu, 13 November 2024 selama 17 menit di Ruang Perpustakaan.

Proses penggalian data yang dilakukan dengan wawancara berjalan dengan lancar dan semua pihak yang diwawancara memiliki antusiasme dan keterbukaan pemikiran yang positif terhadap topik penelitian. Informan yang dipilih juga memberikan informasi serta gambaran pelaksanaan kebijakan yang sangat detail dan terarah. Sehingga peneliti tidak merasa kesulitan dalam melakukan wawancara dan menggali informasi yang dibutuhkan.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang bersumber pada catatan peristiwa yang sudah berlalu, dapat berupa tulisan, gambar, maupun karya-karya monumental (Sugiyono, 2015). Metode dokumentasi diperlukan sebagai metode pendukung untuk mendapatkan data, karena dalam metode dokumentasi ini dapat diperoleh data-data historis dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian ini. Selain mempelajari dokumen teks, pengumpulan data dengan menggali informasi-informasi yang ada pada website.

1.7.9 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sebelum, saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data sebelum terjun ke lapangan merupakan analisis data sekunder, yaitu dengan analisis data hasil studi pendahuluan yang digunakan untuk menentukan fokus penelitian (Sugiyono, 2015). Sedangkan analisis data lapangan dilakukan dengan merujuk pada model Miles & Huberman (2014) yang mengemukakan bahwa aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif secara terus menerus sampai tuntas sehingga diperoleh data jenuh. Adapun langkah-langkah dalam proses analisis data tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kondensasi Data, mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstraksian atau disebut juga sebagai transformasi data yang muncul dalam data observasi, transkrip wawancara, dokumen dan materi empiris lainnya. Adapun kondensasi dalam penelitian ini dilakukan dengan memilih data dari hasil penelitian kemudian ditransformasikan data-data tersebut secara sistematis berdasarkan tujuan penelitian.
- b. Penyajian Data, yaitu pengumpulan seluruh data penelitian yang disusun secara sistematis baik berupa tabel, bagan atau sejenisnya. Sementara penyajian data dalam penelitian ini dilakukan secara mendalam dengan menggolongkan data, menghubungkannya kepada teori, dokumen/literatur serta hasil penelitian yang relevan pada setiap bagian pembahasan.
- c. Penarikan Kesimpulan, tahapan ketiga adalah penarikan kesimpulan dan rekomendasi. Semua hasil penelitian dan pembahasan disinkronkan untuk menemukan faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi

kebijakan kurikulum merdeka sehingga dapat memberikan rekomendasi yang tepat pada akhir penelitian (B.Miles et al., 2014).

Tahapan analisis data ini juga dilakukan triangulasi. Triangulasi dalam penelitian ini berupa menggabungkan atau mengkombinasikan antara satu temuan dengan temuan lain di lapangan, pendapat ahli yang dikutip dari literatur dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Tujuan penggabungan ini adalah untuk memvaliditasi data dan memperkuat argumen terhadap temuan lapangan, sehingga tidak ada kebiasaan dalam penelitian ini.